

# EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA)

---

## TAHUN 2021



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**DINAS KETENAGAKERJAAN**

JL. A.P.PETTARANI NO. 72; TELP/FAX. : (0411) 853930;  
HOMEPAGE : [www.makassar.go.id](http://www.makassar.go.id)

Dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pada pasal 29 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa Pimpinan Kementerian/Lembaga dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan masing-masing pada periode sebelumnya. Hal ini berarti kegiatan pengendalian dan evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan perencanaan pembangunan. Dengan melakukan kegiatan pengendalian dan evaluasi diharapkan akan memberikan indikasi tingkat keberhasilan program pembangunan yang telah dan sedang dilaksanakan dalam pencapaian tujuan.

Pelaksanaan Evaluasi Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 diarahkan pada perwujudan pelaksanaan program yang tercantum pada Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar tahun 2021. Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2021 memuat Tujuan dan Sasaran Strategis, dan indikator kinerja utamanya.

Dalam Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2021 tercermin tujuan strategis yang hendak dicapai yaitu Mewujudkan Tenaga Kerja Yang Mandiri, Berdaya Saing Dan Sejahtera Serta Hubungan Industrial Yang Harmonis Dalam Pembangunan Yang Berkelanjutan dan memuat 3 (tiga) sasaran strategis yaitu : 1). Meningkatnya Pemerataan Kesempatan Kerja yang Didukung oleh Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja; 2). Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis serta Kesejahteraan Tenaga Kerja; 3). Terwujudnya administrasi pelayanan ketenagakerjaan yang efektif, akuntabel, dan transparan.

Untuk tahun 2021 Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar mendapat alokasi anggaran belanja daerah sebesar Rp. 16.284.889.151,-

(enam belas milyar dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu seratus lima puluh satu rupiah) yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp. 16.163.676.882,- (enam belas milyar seratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) dan belanja modal sebesar Rp. 121.212.269,- (seratus dua puluh satu juta dua ratus dua belas ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah).

Realisasi kemajuan belanja Dinas Ketenagakerjaan tahun 2021 sebesar Rp. 14.064.482.728,- (empat belas milyar enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) atau 86,44 persen dengan kategori serapan tinggi.

Adapun realisasi program dan kegiatan pada triwulan II tahun 2021 diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp. 9.185.348.820,- (sembilan milyar seratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.680.154.223,- (delapan milyar enam ratus delapan puluh juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah) atau sebesar 94,50 persen;
2. Program Perencanaan Tenaga Kerja terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp. 46.860.000,- (empat puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar 43.887.600,- (empat puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) atau sebesar 93,66 persen;
3. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja terdiri dari 5 (lima) kegiatan dan 6 (enam) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp. 4.206.816.650,- (empat milyar dua ratus enam juta delapan ratus enam belas ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.772.050.104,- (tiga milyar tujuh ratus

tujuh puluh dua juta lima puluh ribu seratus empat rupiah) atau sebesar 89,67 persen;

4. Program Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari 4 (empat) kegiatan dan 9 (sembilan) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp. 2.195.572.481,- (dua milyar seratus sembilan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 964.127.023,- (sembilan ratus enam puluh empat juta seratus dua puluh tujuh ribu dua puluh tiga rupiah) atau sebesar 43,91 persen;
5. Program Hubungan Industrial terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 7 (tujuh) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp. 635.291.200,- (enam ratus tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 604.263.778,- (enam ratus empat juta dua ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) atau sebesar 95,12 persen.

Makassar, Januari 2022  
Kepala Dinas Ketenagakerjaan  
Kota Makassar



*Misduw*

**NILMA PALAMBA, SH. M.AP**

Rangkat : Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP. : 19651210 199112 2 006

# DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF .....	i
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	x
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>01</b>
1.1 Latar Belakang .....	01
1.2 Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Program dan Kegiatan .....	03
<b>BAB II. PERBANDINGAN PROGRAM/KEGIATAN DALAM RENJA DAN RENSTRA DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR ...</b>	<b>17</b>
<b>BAB III. CAPAIAN TARGET KINERJA &amp; PENYERAPAN DANA PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR .....</b>	<b>31</b>
3.1. Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah .....	31
3.2. Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah	37
3.3. Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Strategis Perangkat Daerah .....	52
<b>BAB IV. KENDALA YANG DIHADAPI .....</b>	<b>53</b>
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>56</b>
5.1. Kesimpulan .....	56
5.2. Rekomendasi .....	57

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar .....	05
Tabel 1.2	Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Progran Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2020 .....	09
Tabel 1.3	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 .....	12
Tabel 2.1	Perbandingan antara Program/Kegiatan dalam Renja Dan Renstra .....	20
Tabel 2.2	Analisis Perbandingan Program dan Kegiatan antara Renja Tahun 2020 dan Perubahan Renja Tahun 2020 Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar .....	24
Tabel 2.3	Analisis Perbandingan Program dan Kegiatan Antara Renja Tahun 2020 dan Perubahan Renja Tahun 2020 Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar .....	30
Tabel 3.1	Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah .....	31
Tabel 3.2	Rincian Realisasi Anggaran Tahun 2019.....	48
Tabel 3.3	Rincian Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2019 .....	49
Tabel 3.4	Formulir E.81 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Dinas Ketenagakerjaan .....	51

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-N) tertuang bahwa pada kurun waktu 2005 – 2025 pembangunan Bidang Ketenagakerjaan melalui kebijakan pasar kerja diarahkan untuk mendorong terciptanya lapangan kerja formal yang luas serta meningkatkan kesejahteraan pekerja informal. Selain itu, diharapkan pula terciptanya pasar kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi fleksibel yang ditandai dengan; produktivitas pekerja yang tinggi, pengelolaan pelatihan tenaga kerja bagi program pelatihan strategis, kompetensi pekerja yang sesuai dengan dinamika kebutuhan industri dan persaingan global, hubungan industrial yang harmonis dengan perlindungan yang layak, keselamatan kerja yang memadai, serta terwujudnya proses penyelesaian perselisihan industrial yang memuaskan semua pihak.

Kebijakan pasar kerja diarahkan untuk mendorong terciptanya sebanyak mungkin lapangan kerja formal serta meningkatkan kesejahteraan pekerja di sektor-sektor pekerja informal. Pasar kerja yang fleksibel, hubungan industrial yang harmonis dengan perlindungan yang layak, keselamatan kerja yang memadai, serta terwujudnya proses penyelesaian masalah industrial yang memuaskan semua pihak merupakan ciri pasar kerja yang diinginkan. Selain itu, pekerja diharapkan mempunyai produktivitas yang tinggi sehingga dapat bersaing serta menghasilkan nilai tambah yang tinggi pula. Hal tersebut dilakukan dengan pengelolaan pelatihan dan pemberian dukungan bagi program-program pelatihan yang strategis untuk efektivitas dan efisiensi peningkatan kualitas tenaga kerja sebagai bagian integral dari investasi sumber daya manusia. Sebagian besar pekerja akan dibekali

dengan pengakuan kompetensi profesi sesuai dinamika kebutuhan industri dan dinamika persaingan global.

Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar merupakan bagian dari Pemerintah Kota Makassar dengan tugas dan tanggung jawab dalam hal pelayanan umum ketenagakerjaan yang meliputi perencanaan, perluasan dan penempatan, pelatihan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, pembinaan hubungan industrial dan syarat-syarat kerja serta pengawasan dan perlindungan ketenagakerjaan. Guna mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan untuk jangka waktu tertentu, perbaikan dan peningkatan kualitas dari program-program pembangunan perlu terus menerus dilakukan. Masukan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas tersebut dapat diperoleh dengan melakukan tinjauan atau evaluasi terhadap pelaksanaan program-program pembangunan yang sudah dilakukan sebelumnya. Kegiatan tinjauan atau evaluasi ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan rencana pembangunan yang terukur.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara diwajibkan menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Penyusunan Evaluasi Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar pada Tahun 2021 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kerja Tahun 2021, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja pada tahun mendatang. Pelaporan



kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Target kinerja yang harus dicapai Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar tahun 2021, yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, substansi penyusunan Evaluasi Rencana Kerja Tahun 2021 didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing unit satuan kerja yang ada di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar pada Tahun 2021.

Sesuai dengan uraian-uraian di atas itulah pada kesempatan ini dilakukan evaluasi terhadap program kerja pada Dinas Ketenagakerjaan yang telah dibuat pada Tahun 2021.

## **1.2. Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Program dan Kegiatan**

Sesuai amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 147 ayat 1 dan 2 yang berbunyi :

- (1) Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah provinsi, penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD provinsi periode berkenaan serta arah kebijakan dan isu strategis RKP, serta mengacu

pada RPJMN untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah provinsi dengan pembangunan nasional.

- (2) Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah kabupaten/ kota, penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota dan mengacu pada RPJMD provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah kabupaten/ kota dengan pembangunan Daerah provinsi.

Sehingga dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar berpedoman pada :

1. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024 Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
2. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025;

Dalam implementasi seluruh jenis pelayanan dan tugas Dinas Ketenagakerjaan sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020 Kota Makassar memberikan kontribusi pada Sasaran 2 (dua) RPJPD Tahun 2005-2025 Kota Makassar yaitu **“Meningkatnya kesejahteraan masyarakat berbasis daya saing perdagangan dan jasa”** melalui indikator sasaran PDRB/Kapita dengan target 114.171.731 dan indikator sasaran angka pengangguran dengan target 11,12%.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Untuk adanya kesatuan pandang dalam rangka melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan bidang ketenagakerjaan dirumuskan tujuan dan sasaran sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas

Ketenagakerjaan serta mengacu pada strategi pembangunan daerah Kota Makassar sebagaimana Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021 Kota Makassar. Tujuan adalah penjabaran dari kenyataan hasil akhir yang akan dicapai. Adanya tujuan ini maka fokus kinerja dinas dapat dipertajam dan memberikan arah untuk sasaran yang diharapkan.

Dari 4 (empat) pedoman di atas maka dapat disusun tujuan dan sasaran strategis Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Ketenagakerjaan**  
**Kota Makassar**

<b>TUJUAN : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BERBASIS DAYA SAING SERTA HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG HARMONIS DALAM PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN</b>		
<b>INDIKATOR TUJUAN</b>		<b>TARGET</b>
<b>1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja</b>		<b>60,00%</b>
<b>2. Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja</b>		<b>2,50%</b>
<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>
1. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dengan Pemerataan Kesempatan Kerja yang Didukung oleh Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	1.1. Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	89,00%
	1.2. Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	33,00%
	1.3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	60,00%
2. Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis serta Kesejahteraan Tenaga Kerja	2.1. Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	2,50%
	2.2. Upah rata-rata per jam pekerja	18.532
3. Terwujudnya administrasi pelayanan ketenagakerjaan yang efektif, akuntabel, dan transparan	3.1. Indeks Kepuasan Masyarakat	85
	3.2. Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	A

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis di atas Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar menetapkan beberapa kebijakan yang harus diperhatikan sebagai berikut :

1. Penempatan tenaga kerja pada pekerjaan yang layak di sektor formal dan perlindungan tenaga kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
2. Pengembangan dan perluasan kesempatan kerja di sektor informal yang produktif dan remuneratif perluasan kesempatan kerja di sektor informal;
3. Pengembangan jejaring informasi pasar kerja untuk mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja di pasar kerja;
4. Pembudayaan usaha mandiri, pembinaan padat karya produktif dan pengenalan eknologi tepat guna (TTG) untuk mengoptimalkan perluasan kesempatan kerja di sektor informal;
5. Peningkatan keterampilan, kompetensi dan kualitas produktivitas tenaga kerja untuk mencetak tenaga kerja dan wirausaha baru yang berdaya saing;
6. Memberikan pelayanan mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
7. Memberikan pemahaman tentang Peraturan Ketenagakerjaan kepada pengusaha dan pekerja;
8. Mewujudkan sistem pengupahan yang adil;
9. Meningkatkan kualitas tata kelola persyaratan kerja, kesejahteraan dan analisis diskriminasi;
10. Peningkatan program perlindungan sosial bagi pekerja/buruh

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terampil dan produktif sesuai kebutuhan pasar kerja dan dunia kerja; meningkatkan peluang kesempatan kerja, dan perluasan kerja; serta pembinaan dan pengembangan hubungan industrial, Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar menyusun rencana operasional teknis teknis yang diimplementasikan dalam 4 (empat) urusan wajib yang dirumuskan berdasarkan:

1. Usulan Masyarakat melalui proses musrenbang dan forum SKPD dibawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar;

2. Rumusan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2021.

Adapun faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

1. Pencapaian SDGs dalam pembangunan berkelanjutan
2. Pengentasan pengangguran;
3. Pencapaian target Sasaran 2 (dua) pada RPJPD Tahun 2005-2025 Kota Makassar;
4. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah

Perumusan program dan kegiatan bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Tahapan ini merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam penyusunan program/kegiatan. Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional, program dan kegiatan dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu program/kegiatan untuk perencanaan strategis dan program/kegiatan untuk perencanaan operasional.

Berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan bidang ketenagakerjaan maka dibuatlah program prioritas dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan.

Pandemi Covid-19 turut berdampak terhadap peningkatan angka pengangguran yang diprediksi akan meningkat pada tahun 2020. Dinas Ketenagakerjaan melakukan 3 langkah strategis guna menekan angka pengangguran di masa pandemi Covid-19.

Langkah strategis itu mulai dari pelatihan berbasis kompetensi dan produktivitas melalui Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja. Dalam program ini, peserta pelatihan tidak hanya berasal dari pencari kerja baru akan tetapi juga berasal dari tenaga kerja yang terkena PHK akibat Covid-19. Selain itu dalam program ini, peserta

pelatihan tidak hanya mendapatkan keterampilan, tetapi juga mendapatkan pemagangan dan sertifikasi profesi/kompetensi.

Langkah strategis ke 2 (dua) melalui Program Penempatan Tenaga Kerja melalui pengembangan perluasan kesempatan kerja bagi pekerja/buruh terdampak Covid-19 berupa program padat karya dan kewirausahaan. Dimana dampak negatif Covid-19 di bidang ketenagakerjaan, tidak hanya dirasakan oleh perusahaan dan pekerjanya di sektor formal. Namun juga dirasakan oleh pekerja di sektor informal seperti buruh bebas maupun pekerja mandiri.

Langkah strategis ketiga, Dinas Ketenagakerjaan melalui Program Hubungan Industrial telah melakukan pendataan terutama perusahaan yang terdampak serta jumlah pekerja yang dirumahkan dan atau di PHK; pengawasan dan perlindungan terhadap pekerja sehingga di perlakukan secara adil oleh pemberi kerja melalui pelatihan kerja dan memperoleh pelatihan-pelatihan, membuka layanan informasi, konsultasi, dan pengaduan bagi pekerja/buruh yang terkena PHK akibat Covid-19 dan meningkatkan layanan mediasi bila terjadi perselisihan antara pekerja dengan perusahaan.

Penyusunan program perangkat daerah disusun dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang telah ditentukan. Keterkaitan antara tujuan, sasaran dan program perangkat daerah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel. 1.2**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Dan Program Dinas Ketenagakerjaan**  
**Kota Makassar Tahun 2021**

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Daya Saing Serta Hubungan Industrial Yang Harmonis Dalam Pembangunan Yang Berkelanjutan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	60%	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dengan Pemerataan Kesempatan Kerja yang Didukung oleh Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	89%	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Kebutuhan Perencanaan Tenaga Kerja Yang Disusun	50%
				Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	33%	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat	90%
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	60%	Program Penempatan Tenaga Kerja	Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan	86%
	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja	2,5%	Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis serta Kesejahteraan Tenaga Kerja	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per-tahun	2,5%	Program Hubungan Industrial	Persentase kasus Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	96%
				Upah rata-rata per jam pekerja	18.532		Upah rata-rata per-Jam Pekerja	18.532

			Terwujudnya administrasi pelayanan ketenagakerjaan yang efektif, akuntabel, dan transparan	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	100%
				Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	A		Indeks Kepuasan ASN Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan (Kepegawaiaan, Perlengkapan, Dan Keuangan)	90%
							Persentase Asn Perangkat Daerah Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	90%
							Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	90%



Uraian garis besar mengenai rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021, adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan bidang ketenagakerjaan pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 direncanakan dalam 5 Program terdiri dari 4 Program Urusan Wajib (2 Program Prioritas dan 2 Program Utama) dan 1 Program Penunjang yang dijabarkan dalam 17 Kegiatan terdiri dari 4 kegiatan penunjang dan 13 kegiatan urusan wajib;
2. Lokasi program dan kegiatan tersebar pada semua Kecamatan se Kota Makassar, yang secara lebih spesifik kelompok sasaran yang dituju adalah para pencari kerja, tenaga kerja/buruh, organisasi pekerja/buruh, perusahaan, lembaga pelatihan kerja, dan masyarakat umum lainnya yang membutuhkan pelayanan di bidang ketenagakerjaan serta perangkat daerah;
3. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dibutuhkan untuk tahun anggaran 2021, adalah : Rp. 18.052.000.000 -, dimana dari usulan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kota Makassar sebanyak 31 usulan kegiatan yang terakomodir oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar sebanyak 26 usulan kegiatan;
4. Rumusan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD Tahun 2021 Kota Makassar;

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar adalah sesuai tabel 1.3 sesuai format T-C.33 berikut :

**Tabel 1.3 (T-C.33)**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021**  
**dan Prakiraan Maju Tahun 2022**  
**Kota Makassar**

Nama SKPD : Dinas Ketenagakerjaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
2		<b>URUSAN WAJIB</b>									
2	2.07	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>			18.052.000.000				19.496.160.000		
2	2.07	01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>PERSENTASE KETERSEDIAAN LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>	Kota Makassar	100%	11.202.378.200	APBD	100%	12.098.568.456	
				<b>INDEKS KEPUASAN ASN PERANGKAT DAERAH TERHADAP PELAYANAN KESEKRETARIATAN (KEPEGAWAIAN, PERLENGKAPAN, DAN KEUANGAN)</b>		90%			90%		
				<b>PERSENTASE ASN PERANGKAT DAERAH YANG MENDAPAT PENINGKATAN KAPASITAS</b>		90%			90%		
				<b>PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA APARATUR DALAM KONDISI BAIK</b>		90%			90%		
2	2.07	01	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Kota Makassar	11 Dok	135.038.000	APBD	11 Dok	145.841.040
2	2.07	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Makassar	2 Dok	75.999.000	APBD	2 Dok	82.078.920
					Jumlah Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah		1 Dok			1 Dok	
2	2.07	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Makassar	1 Dok	11.034.000	APBD	1 Dok	11.916.720
2	2.07	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Makassar	1 Dok	10.329.000	APBD	1 Dok	11.155.320
2	2.07	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Makassar	1 Dok	8.717.000	APBD	1 Dok	9.414.360
2	2.07	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Makassar	1 Dok	8.552.000	APBD	1 Dok	9.236.160
2	2.07	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Makassar	1 Dok	11.384.000	APBD	1 Dok	12.294.720
					Jumlah Penyusunan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah		1 Dok			1 Dok	
2	2.07	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar	1 Dok	9.023.000	APBD	1 Dok	9.744.840

					Jumlah Penyusunan Dokumen LAKIP Perangkat Daerah		1 Dok				1 Dok		
2	2.07	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersusun</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>9.502.060.000</b>	<b>APBD</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>10.262.224.800</b>
2	2.07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Makassar	12 Bulan	9.160.300.000	APBD		12 Bulan	9.893.124.000
2	2.07	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kota Makassar	12 Bulan	245.760.000	APBD		12 Bulan	265.420.800
2	2.07	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Makassar	12 Bulan	96.000.000	APBD		12 Bulan	103.680.000
2	2.07	01	2.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersusun</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>117.659.600</b>	<b>APBD</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>127.072.368</b>
2	2.07	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Jasa Pengamanan Gedung Kantor	Kota Makassar	12 Bulan	55.627.200	APBD		12 Bulan	60.077.376
2	2.07	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota Makassar	12 Bulan	62.032.400	APBD		12 Bulan	66.994.992
2	2.07	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>3 Jenis</b>	<b>162.621.400</b>	<b>APBD</b>		<b>3 Jenis</b>	<b>175.631.112</b>
2	2.07	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Kota Makassar	108 Psg	64.800.000	APBD		108 Psg	69.984.000
2	2.07	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pelayanan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Makassar	12 Bulan	61.821.400	APBD		12 Bulan	66.767.112
2	2.07	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diadakan	Kota Makassar	3 orang	36.000.000	APBD		3 orang	38.880.000
2	2.07	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Jasa Adminitrasi Umum yang Tersedia</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>8 Jenis</b>	<b>359.294.132</b>	<b>APBD</b>		<b>8 Jenis</b>	<b>388.037.663</b>
2	2.07	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Kota Makassar	8 Jenis	14.299.750	APBD		8 Jenis	15.443.730
2	2.07	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Makassar	12 Bulan	95.704.382	APBD		12 Bulan	103.360.733
2	2.07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak	Kota Makassar	4 Jenis	17.190.000	APBD		4 Jenis	18.565.200
2	2.07	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan	Kota Makassar	12 Bulan	19.500.000	APBD		12 Bulan	21.060.000
2	2.07	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu	Kota Makassar	12 Bulan	21.600.000	APBD		12 Bulan	23.328.000
2	2.07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyediaan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Kota Makassar	12 Bulan	191.000.000	APBD		12 Bulan	206.280.000
2	2.07	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Pengadaan BMD</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>3 Unit</b>	<b>61.107.500</b>	<b>APBD</b>		<b>3 Unit</b>	<b>65.996.100</b>
2	2.07	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Mesin Fotocopy	Kota Makassar	1 Unit	61.107.500	APBD		1 Unit	65.996.100
						Jumlah Pengadaan AC		1 Unit				1 Unit	
						Jumlah Pengadaan Hardisk External		1 Unit				1 Unit	
2	2.07	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>3 Jenis</b>	<b>509.113.968</b>	<b>APBD</b>		<b>3 Jenis</b>	<b>549.843.085</b>
2	2.07	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan	Kota Makassar	12 Bulan	149.508.600	APBD		12 Bulan	161.469.288
2	2.07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Makassar	12 Bulan	284.427.768	APBD		12 Bulan	307.181.989

2	2.07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan	Kota Makassar	12 Bulan	75.177.600	APBD		12 Bulan	81.191.808
						Jumlah Penyediaan Kebersihan Kantor		12 Bulan				12 Bulan	
2	2.07	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>4 Jenis</b>	<b>355.483.600</b>	<b>APBD</b>		<b>4 Jenis</b>	<b>383.922.288</b>
2	2.07	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Mobil Jabatan Secara Rutin/berkala	Kota Makassar	1 Unit	40.597.000	APBD		1 Unit	43.844.760
2	2.07	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Bus Pekerja Secara Rutin/Berkala	Kota Makassar	1 Unit	280.966.600	APBD		1 Unit	303.443.928
						Jumlah Pemeliharaan Mobil Operasional Secara Rutin/Berkala		6 Unit				6 Unit	
						Jumlah Pemeliharaan Motor Operasional Secara Rutin/Berkala		7 Unit				7 Unit	
2	2.07	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Komputer/ Laptop Secara Rutin/Berkala	Kota Makassar	15 Unit	33.920.000	APBD		15 Unit	36.633.600
						Jumlah Pemeliharaan Printer Secara Rutin/Berkala		5 Unit				5 Unit	
						Jumlah Pemeliharaan AC Secara Rutin/Berkala		8 Unit				8 Unit	
2	2.07	2			<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>	<b>PERSENTASE KEBUTUHAN PERENCANAAN TENAGA KERJA YANG DISUSUN</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>50%</b>	<b>82.468.000</b>	<b>APBD</b>		<b>50%</b>	<b>89.065.440</b>
2	2.07	2	2.01		<b>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</b>	<b>Jumlah Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang disusun</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>1 Dok</b>	<b>82.468.000</b>	<b>APBD</b>		<b>1 Dok</b>	<b>89.065.440</b>
2	2.07	2	2.01	02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kota Makassar	100 Orang	82.468.000	APBD		100 Orang	89.065.440
2	2.07	3			<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>PERSENTASE TENAGA KERJA YANG MENDAPATKAN PELATIHAN BERBASIS MASYARAKAT</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>90%</b>	<b>4.584.754.150</b>	<b>APBD</b>		<b>90%</b>	<b>4.951.534.482</b>
2	2.07	3	2.01		<b>Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi</b>	<b>Jumlah Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi yang dilaksanakan</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>8 Jenis</b>	<b>3.447.571.550</b>	<b>APBD</b>		<b>8 Jenis</b>	<b>3.723.377.274</b>
2	2.07	3	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan	Kota Makassar	620 Orang	3.178.948.550	APBD		620 Orang	3.433.264.434
2	2.07	3	2.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja yang dilaksanakan	Kota Makassar	240 Orang	268.623.000	APBD		240 Orang	290.112.840
2	2.07	3	2.02		<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>	<b>Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Mendapat Pembinaan</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>100 LPK</b>	<b>118.172.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100 LPK</b>	<b>127.625.760</b>
2	2.07	3	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Makassar	12 Kali	118.172.000	APBD		12 Kali	127.625.760
						Jumlah peserta Pelatihan Penatausahaan Lembaga Pelatihan swasta (LPK)		100 Orang				100 Orang	

2	2.07	3	2.03		<b>Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja</b>	<b>Jumlah Penyediaan Jasa Perizinan dan Pendaftaran</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>270.086.600</b>	<b>APBD</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>291.693.528</b>
2	2.07	3	2.03	01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Jumlah Peserta Bimtek Penyuluhan Standar Mutu dan Tata Kelola LPK	Kota Makassar	100 Orang	270.086.600	APBD		100 Orang	291.693.528
						Jumlah Pelayanan Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi yang disediakan	Kota Makassar	12 Bulan				12 Bulan	
2	2.07	3	2.04		<b>Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil</b>	<b>Jumlah Perusahaan Kecil yang mendapat Konsultasi Produktivitas</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>240 Prshn</b>	<b>340.470.000</b>	<b>APBD</b>		<b>240 Prshn</b>	<b>367.707.600</b>
2	2.07	3	2.04	01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Pembinaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil yang dilaksanakan	Kota Makassar	325 Orang	340.470.000	APBD		325 Orang	367.707.600
2	2.07	3	2.05		<b>Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Pengukuran Produktifitas Perusahaan</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>100 Prshn</b>	<b>408.454.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100 Prshn</b>	<b>441.130.320</b>
2	2.07	3	2.05	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Pengukuran Produktifitas Perusahaan	Kota Makassar	100 Prshn	408.454.000	APBD		100 Prshn	441.130.320
						Jumlah Peserta Pelatihan Bahasa Asing		40 Orang				40 Orang	
						Jumlah Peserta Pelatihan Matematika		20 Orang				20 Orang	
						Jumlah Seleksi Pemagangan		1 Keg				1 Keg	
2	2.07	4			<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>BESARAN PENCARI KERJA YANG TERDAFTAR YANG DITEMPATKAN</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>86%</b>	<b>1.413.880.450</b>	<b>APBD</b>		<b>86%</b>	<b>1.526.990.886</b>
2	2.07	4	2.01		<b>Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Pelayanan Antarkerja di Kota Makassar</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>700.450.800</b>	<b>APBD</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>756.486.864</b>
2	2.07	4	2.01	01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah Dokumen Pemutakhiran Database Ketenagakerjaan	Kota Makassar	1 Dok	160.574.800	APBD		1 Dok	173.420.784
						Jumlah Pelayanan Antar Kerja		12 Bulan				12 Bulan	-
2	2.07	4	2.01	04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Peserta FGD Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Kota Makassar	200 Orang	57.044.000	APBD		200 Orang	61.607.520
2	2.07	4	2.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah peserta pembinaan tenaga kerja mandiri	Kota Makassar	76 Orang	482.832.000	APBD		76 Orang	521.458.560
2	2.07	4	2.02		<b>Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah Pelayanan Penerbitan rekomendasi Penerbitan Izin LPTKS</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>72.905.400</b>	<b>APBD</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>78.737.832</b>
2	2.07	4	2.02	01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi yang disediakan	Kota Makassar	12 Bulan	61.041.400	APBD		12 Bulan	65.924.712
2	2.07	4	2.02	02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Kota Makassar	4 Keg	11.864.000	APBD		4 Keg	12.813.120
2	2.07	4	2.03		<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	<b>Jumlah Informasi Pasar Kerja yang dikelola</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>12.000 Loker</b>	<b>599.600.000</b>	<b>APBD</b>		<b>12.000 Loker</b>	<b>647.568.000</b>
2	2.07	4	2.03	01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kota Makassar	12 Bulan	23.232.000	APBD		12 Bulan	25.090.560
2	2.07	4	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kota Makassar	12 Bulan	235.500.000	APBD		12 Bulan	254.340.000
2	2.07	4	2.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pelaksanaan Job Fair/Bursa Kerja	Kota Makassar	1 Kali	340.868.000	APBD		1 Kali	368.137.440
2	2.07	4	2.04		<b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah PMI Purna Penempatan yang Diberi Pembekalan Pelatihan</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>20 Orang</b>	<b>40.924.250</b>	<b>APBD</b>		<b>20 Orang</b>	<b>44.198.190</b>

2	2.07	4	2.04	01	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (calon/purna yang diberikan pembinaan	Kota Makassar	20 Orang	40.924.250	APBD		20 Orang	44.198.190
2	2.07	5			<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>ANGKA SENGKETA PERUSAHAAN-PEKERJA PERTAHUN</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>2,50%</b>	<b>768.519.200</b>	<b>APBD</b>		<b>2,50%</b>	<b>830.000.736</b>
						<b>PERSENTASE KASUS HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG DISELESAIKAN DENGAN PERJANJIAN BERSAMA (PB)</b>		<b>96,00%</b>				<b>96,00%</b>	
2	2.07	5	2.01		<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya</b>	<b>Jumlah Pelayanan Pengesahan PP dan pelayanan Pendaftaran PKB</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>311.948.000</b>	<b>APBD</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>336.903.840</b>
2	2.07	5	2.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Pembinaan dan Pemantauan Outsourcing dan Pendorongan	Kota Makassar	60 Prshn	128.331.000	APBD		60 Prshn	138.597.480
						Jumlah Pembinaan PKWT		50 Prshn				50 Prshn	
2	2.07	5	2.01	02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Pembinaan dan Pemantauan PP/PKB (Pembinaan PP/PKB)	Kota Makassar	2 Kali	30.559.000	APBD		2 Kali	33.003.720
2	2.07	5	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Pembinaan dan Pemantauan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Kota Makassar	4 Triwln	153.058.000	APBD		4 Triwln	165.302.640
						Jumlah Pembinaan dan Pemantauan Upah Minimum Kota		4 Triwln				-	
						Jumlah Penetapan Upah Minimum		1 UMK				-	
2	2.07	5	2.02		<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>456.571.200</b>	<b>APBD</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>493.096.896</b>
2	2.07	5	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dialog Ketenagakerjaan (Mayday)	Kota Makassar	2 Keg	42.492.000	APBD		2 Keg	45.891.360
						Jumlah Penetapan Upah Minimum Kota		2 Keg				-	
2	2.07	5	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pelayanan mediasi pengaduan perselisihan hubungan industrial	Kota Makassar	12 Bulan	204.667.200	APBD		12 Bulan	221.040.576
						Jumlah Peserta Temu Teknis Penegakan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial		50 orang				-	
2	2.07	5	2.02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Pembinaan dan Pemantauan Tujangan Hari Raya ( THR )	Kota Makassar	1 Keg	14.472.000	APBD		1 Keg	15.629.760
						Jumlah Pembinaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja		50 Prshn				50 Prshn	
2	2.07	5	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pertemuan LKS yang dilaksanakan	Kota Makassar	12 Kali	194.940.000	APBD		12 Kali	210.535.200
<b>TOTAL PAGU INDIKATIF</b>									<b>18.052.000.000</b>				<b>19.496.160.000</b>

# BAB 2

## PERBANDINGAN PROGRAM/KEGIATAN DALAM RENJA DAN RENSTRA DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR

Sebagai dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menterjemahkan, mengoperasionalkan RKPD ke dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD secara keseluruhan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2021 adalah merupakan dokumen perencanaan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar untuk periode Tahun 2021 yang memuat Rencana Program/Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 beserta rincian target kinerja capaian program yang akan di capai pada tahun 2021. Penyusunan Rencana Kerja tahun 2021 disusun berpedoman pada Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2021, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 sesuai amanah Pasal 147 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dimana pada tahun 2020 Pemerintah Kota Makassar belum memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sehingga Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar belum menyusun Rencana Strategis (RENSTRA).

Perencanaan Pembangunan Kota Makassar tahun 2021 telah tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2021 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota Makassar Nomor 40 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Makassar Tahun 2021. Mempedomani dokumen RKPD Tahun 2021 tersebut, telah disusun pula dokumen Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2021 yang telah ditetapkan melalui Keputusan Walikota Makassar Nomor 1300/060.1/TAHUN 2020 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 dengan lampiran 51 Perangkat Daerah.

Dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2021 untuk pembangunan bidang ketenagakerjaan tahun anggaran 2021 direncanakan dalam 5 program yang dijabarkan dalam 13 kegiatan dan 51 subkegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 18.052.000.000,-.

Sebagai upaya optimalisasi pengelolaan anggaran sehingga seluruh target dan sasaran dapat tercapai disusun Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2021 lebih memuat berbagai perubahan pergeseran anggaran tanpa penambahan kegiatan yang ada. Pergeseran anggaran tersebut dilakukan akibat adanya perubahan volume kegiatan maupun optimalisasi pemanfaatan dana silpa kegiatan yang telah selesai dilaksanakan.

Secara ringkas dari total 51 subkegiatan, terdapat 19 subkegiatan (37,25%) tidak mengalami perubahan, dan sebanyak 32 subkegiatan (62,75%) mengalami perubahan (28 kegiatan mengalami pengurangan dan 4 kegiatan mengalami penambahan) di Perubahan RENJA Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2021. Dimana berdasarkan RENJA Tahun 2021 pagu Indikatif sebesar Rp. 18.049.000.000,- (delapan belas milyar empat puluh sembilan juta rupiah), sedangkan pada Perubahan RENJA Pagu Indikatif sebesar Rp. 16.214.889.151,- (enam belas milyar dua ratus empat belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus lima puluh satu rupiah), berkurang sebanyak Rp. 1.837.110.849,00,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah) atau berkurang 10,18 persen.



Pada tahun 2021 Pemerintah Kota Makassar belum memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sehingga Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar belum menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) sehingga tidak terdapat pembahasan perbandingan program/kegiatan dalam Renja dan Renstra Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar.

Adapun rincian perubahan anggaran sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2021 direncanakan melaksanakan 8 (delapan) kegiatan dan 28 (duapuluh delapan) subkegiatan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp. 11.202.378.200,- (sebelas milyar dua ratus dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah). Dalam pelaksanaannya mengalami perubahan menjadi 8 (delapan) kegiatan dan 27 (duapuluh tujuh) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 9.130.348.820,- (sembilan milyar seratus tiga puluh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh rupiah) atau berkurang 18,50 persen (Rp. 2.072.029.380,-);
2. Program Perencanaan Tenaga Kerja pada tahun 2021 direncanakan melaksanakan 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) subkegiatan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp. 82.468.000,- (delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah). Dalam pelaksanaannya mengalami perubahan menjadi Rp. 46.860.000,- (empat puluh enam juta delapan ratus enam puluh rupiah) atau berkurang 43,18 persen (Rp.35.608.000,-);
3. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja pada tahun 2021 direncanakan melaksanakan 5 (lima) kegiatan dan 6 (enam) subkegiatan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp. 4.584.754.150,- (empat milyar lima ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah). Dalam pelaksanaannya mengalami perubahan menjadi Rp. 4.206.816.650,- (empat milyar dua ratus enam juta delapan ratus enam belas ribu enam ratus lima puluh rupiah) atau berkurang 8,24 persen (Rp. 377.937.500,-);
4. Program Penempatan Tenaga Kerja pada tahun 2021 direncanakan melaksanakan 4 (empat) kegiatan dan 9 (sembilan) subkegiatan dengan

anggaran dari APBD sebesar Rp. 1.413.880.450,- (satu milyar empat ratus tiga belas juta delapan ratus delapan puluh ribu empat ratus lima puluh ribu rupiah). Dalam pelaksanaannya mengalami perubahan menjadi Rp. 2.195.572.481,- (dua milyar seratus Sembilan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) atau bertambah 55,29 persen (Rp. 781.692.031,-);

5. Program Hubungan Industrial pada tahun 2021 direncanakan melaksanakan 2 (dua) kegiatan dan 7 (tujuh) subkegiatan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp. 768.519.200,- (tujuh ratus enam puluh delapan juta lima ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah). Dalam pelaksanaannya mengalami perubahan menjadi Rp. 635.291.200,- (enam ratus tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) atau berkurang 17,34 persen (Rp. 133.228.000,-).

Adapun program/kegiatan/subkegiatan yang mengalami perubahan sebagaimana tertuang pada tabel 2.1 dan perbandingan program/kegiatan dalam Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Ketenagakerjaan tahun anggaran 2021 pada tabel 2.2 berikut :

**TABEL 2.1 (FORMAT F I.)**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021**  
**KOTA MAKASSAR**

**Nama Perangkat Daerah : Dinas Ketenagakerjaan**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Rencana Tahun 2021 (Tahun Berjalan)															Perkiraan Maju Tahun 2022		Jenis Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif							
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			Jumlah Perubahan (+/-)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13) = 12-11	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)				
2	URUSAN WAJIB																					
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																					
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																					
2	01	PERSENTASE KETERSEDIAAN LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	PERSENTASE KETERSEDIAAN LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Kota Makassar	Kota Makassar	100%	100%	18.052.000.000	16.214.889.151	(1.837.110.849)	APBD	APBD	100%	18.052.000.000	c	Dianaker				
		INDEKS KEPASIHAN ASN PERANGKAT DAERAH TERHADAP PELAYANAN KESEKRETARIATAN (KEPEGAWAIAAN, PERLENGKAPAN, DAN KEUANGAN)	INDEKS KEPASIHAN ASN PERANGKAT DAERAH TERHADAP PELAYANAN KESEKRETARIATAN (KEPEGAWAIAAN, PERLENGKAPAN, DAN KEUANGAN)					90%	90%						90%							
		PERSENTASE ASN PERANGKAT DAERAH YANG MENDAPAT PENINGKATAN KAPASITAS	PERSENTASE ASN PERANGKAT DAERAH YANG MENDAPAT PENINGKATAN KAPASITAS					90%	90%						90%							
		PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA APARATUR DALAM KONDISI BAIK	PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA APARATUR DALAM KONDISI BAIK					90%	90%						90%							
2	2.07	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kevrausahaan	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Kota Makassar	Kota Makassar	11 Dok	11 Dok	135.038.000	128.638.000	(6.400.000)	APBD	APBD	11	135.038.000	c	Dianaker	
2	2.07	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Kota Makassar	Kota Makassar	2 Dok	2 Dok	75.999.000	69.599.000	(6.400.000)	APBD	APBD	2	75.999.000	c	Dianaker
2	2.07	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Kota Makassar	Kota Makassar	1 Dok	1 Dok	11.034.000	11.034.000	0	APBD	APBD	1	11.034.000	c	Dianaker
2	2.07	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Kota Makassar	Kota Makassar	1 Dok	1 Dok	10.329.000	10.329.000	0	APBD	APBD	1	10.329.000	c	Dianaker
2	2.07	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Kota Makassar	Kota Makassar	1 Dok	1 Dok	8.717.000	8.717.000	0	APBD	APBD	1	8.717.000	c	Dianaker
2	2.07	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Kota Makassar	Kota Makassar	1 Dok	1 Dok	8.552.000	8.552.000	0	APBD	APBD	1	8.552.000	c	Dianaker
2	2.07	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Kota Makassar	Kota Makassar	1 Dok	1 Dok	11.384.000	11.384.000	0	APBD	APBD	1	11.384.000	c	Dianaker
2	2.07	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Kota Makassar	Kota Makassar	1 Dok	1 Dok	9.023.000	9.023.000	0	APBD	APBD	1	9.023.000	c	Dianaker
2	2.07	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Kota Makassar	Kota Makassar	1 Dok	1 Dok	9.023.000	9.023.000	0	APBD	APBD	1	9.023.000	c	Dianaker
2	2.07	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen LAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen LAKIP Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Kota Makassar	Kota Makassar	1 Dok	1 Dok	9.023.000	9.023.000	0	APBD	APBD	1	9.023.000	c	Dianaker
2	2.07	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersusun	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersusun	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Kota Makassar	Kota Makassar	12 Bulan	12 Bulan	9.502.060.000	7.650.632.949	(1.851.427.051)	APBD	APBD	12	9.502.060.000	c	Dianaker	
2	2.07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Kota Makassar	Kota Makassar	12 Bulan	12 Bulan	9.160.300.000	7.308.872.949	(1.851.427.051)	APBD	APBD	12	9.160.300.000	c	Dianaker
2	2.07	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah Pengelolaan Administrasi Keuangan	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Kota Makassar	Kota Makassar	12 Bulan	12 Bulan	245.760.000	245.760.000	0	APBD	APBD	12	245.760.000	c	Dianaker
2	2.07	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Kota Makassar	Kota Makassar	12 Bulan	12 Bulan	96.000.000	96.000.000	0	APBD	APBD	12	96.000.000	c	Dianaker
2	2.07	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersusun	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersusun	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Kota Makassar	Kota Makassar	12 Bulan	12 Bulan	117.659.600	103.752.800	(13.906.800)	APBD	APBD	12	117.659.600	c	Dianaker	
2	2.07	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Jasa Pengamanan Gedung Kantor	Jumlah Jasa Pengamanan Gedung Kantor	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Kota Makassar	Kota Makassar	12 Bulan	12 Bulan	55.627.200	41.720.400	(13.906.800)	APBD	APBD	12	55.627.200	c	Dianaker
2	2.07	01	2.03	03	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Kota Makassar	Kota Makassar	12 Bulan	12 Bulan	62.032.400	62.032.400	0	APBD	APBD	12	62.032.400	c	Dianaker
2	2.07	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Kota Makassar	Kota Makassar	3 Jenis	3 Jenis	162.621.400	126.621.400	(36.000.000)	APBD	APBD	3	162.621.400	c	Dianaker	
2	2.07	01	2.05	01	Pengadaan Pakiaian Dinas Beserta Atribut Kelembagaannya	Jumlah Pengadaan Pakiaian Dinas beserta atributnya	Jumlah Pengadaan Pakiaian Dinas beserta atributnya	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Kota Makassar	Kota Makassar	108 Pag	108 Pag	64.800.000	64.800.000	0	APBD	APBD	108	64.800.000	c	Dianaker
2	2.07	01	2.05	02	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pelayanan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pelayanan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Kota Makassar	Kota Makassar	12 Bulan	12 Bulan	61.821.400	61.821.400	0	APBD	APBD	12	61.821.400	c	Dianaker
2	2.07	01	2.05	03	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diadakan	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diadakan	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Kota Makassar	Kota Makassar	3 orang	0 orang	36.000.000	0	(36.000.000)	APBD	APBD	3	36.000.000	c	Dianaker
2	2.07	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jasa Administrasi Umum yang Tersedia	Jumlah Jasa Administrasi Umum yang Tersedia	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Kota Makassar	Kota Makassar	8 Jenis	8 Jenis	359.294.132	263.509.382	(95.784.750)	APBD	APBD	8	359.294.132	c	Dianaker	
2	2.07	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Kota Makassar	Kota Makassar	8 Jenis	8 Jenis	14.299.750	14.299.750	0	APBD	APBD	8	14.299.750	c	Dianaker
2	2.07	01	2.06	02	Penyediaan Perlengkapan dan Perleengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Kota Makassar	Kota Makassar	12 Bulan	12 Bulan	95.704.382	84.654.632	(11.049.750)	APBD	APBD	12	95.704.382	c	Dianaker
2	2.07	01	2.06	03	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak	Jumlah Penyediaan Barang Cetak	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Kota Makassar	Kota Makassar	4 Jenis	4 Jenis	17.190.000	17.190.000	0	APBD	APBD	4	17.190.000	c	Dianaker
2	2.07	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Kota Makassar	Kota Makassar	12 Bulan	12 Bulan	19.500.000	19.500.000	0	APBD	APBD	12	19.500.000	c	Dianaker
2	2.07	01	2.06	05	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Kota Makassar	Kota Makassar	12 Bulan	12 Bulan	21.600.000	17.865.000	(3.735.000)	APBD	APBD	12	21.600.000	c	Dianaker
2	2.07	01	2.06	06	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyediaan Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah	Jumlah Penyediaan Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Kota Makassar	Kota Makassar	12 Bulan	12 Bulan	191.000.000	110.000.000	(81.000.000)	APBD	APBD	12	191.000.000	c	Dianaker
2	2.07	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan BMD	Jumlah Pengadaan BMD	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Kota Makassar	Kota Makassar	3 Unit	4 Unit	61.107.500	68.042.269	6.934.769	APBD	APBD	3	61.107.500	c	Dianaker	
2	2.07	01	2.07	01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Mesin Fotocopy	Jumlah Pengadaan Mesin Fotocopy	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Kota Makassar	Kota Makassar	1 Unit	1 Unit	61.107.500	68.042.269	6.934.769	APBD	APBD	1	61.107.500	c	Dianaker
					Jumlah Pengadaan AC	Jumlah Pengadaan AC						1 Unit	1 Unit									
					Jumlah Pengadaan Hardisk External	Jumlah Pengadaan Hardisk External						1 Unit	1 Unit									
					Jumlah Pengadaan Printer	Jumlah Pengadaan Printer						0 Unit	1 Unit									
2	2.07	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Kota Makassar	Kota Makassar	3 Jenis	3 Jenis	509.113.968	486.462.220	(22.651.748)	APBD	APBD	3	509.113.968	c	Dianaker	
2	2.07	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Kota Makassar	Kota Makassar	12 Bulan	12 Bulan	149.508.600	147.740.600	(1.768.000)	APBD	APBD	12	149.508.600	c	Dianaker
2	2.07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Kota Makassar	Kota Makassar	12 Bulan	12 Bulan	284.427.768	263.544.020	(20.883.748)	APBD	APBD	12	284.427.768	c	Dianaker
2	2.07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan	Jumlah Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Kota Makassar	Kota Makassar	12 Bulan	12 Bulan	75.177.600	75.177.600	0	APBD	APBD	12	75.177.600	c	Dianaker
2	2.07	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Kota Makassar	Kota Makassar	4 Jenis	4 Jenis	355.483.600	302.689.800	(52.793.800)	APBD	APBD	4	355.483.600	c	Dianaker	
2	2.07	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Mobil Jabatan Secara Rutin/berkala	Jumlah Pemeliharaan Mobil Jabatan Secara Rutin/berkala	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Kota Makassar	Kota Makassar	1 Unit	1 Unit	40.597.000	30.324.000	(10.273.000)	APBD	APBD	1	40.597.000	c	Dianaker
2	2.07	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Pertinaan	Jumlah Pemeliharaan Bus Pekerja Secara Rutin/Berkala	Jumlah Pemeliharaan Bus Pekerja Secara Rutin/Berkala	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Kota Makassar	Kota Makassar	1 Unit	1 Unit	280.966.600	238.445.800	(42.520.800)	APBD	APBD	1	280.966.600	c	Dianaker



				Jumlah Pembinaan dan Pemantauan Upah Minimum Kota					60 Orang												
2	2.07	05	2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan	Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan	Perusahaan dan Pekerja	Perusahaan dan Pekerja	Kota Makassar	Kota Makassar	12 Bulan	12 Bulan	456.571.200	382.051.200	(74.520.000)	APBD	APBD	12	456.571.200	b	Dianaker
2	2.07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dialog Ketenagakerjaan (Mayday)	Perusahaan dan Pekerja	Perusahaan dan Pekerja	Kota Makassar	Kota Makassar	2 Keg	0 Keg	42.492.000	24.082.000	(18.410.000)	APBD	APBD	2	42.492.000	b	Dianaker
					Jumlah Penetapan Upah Minimum Kota	Jumlah Penetapan Upah Minimum Kota					2 Keg	0 Keg						2			
						Pemantau Kampanye Hari Buruh Sedunia						1 Keg									
2	2.07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan mediasi pengaduan perselisihan hubungan industrial	Perusahaan dan Pekerja	Perusahaan dan Pekerja	Kota Makassar	Kota Makassar	12 Bulan	12 Bulan	204.667.200	187.383.200	(17.284.000)	APBD	APBD	12	204.667.200	b	Dianaker
					Jumlah Peserta Temu Teknis Penegakan Perselesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah Peserta Temu Teknis Penegakan Perselesaian Perselisihan Hubungan Industrial					50 orang	0 orang						50			
2	2.07	05	2.02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Pembinaan dan Pemantauan Tujuan Hari Raya (THR)	Perusahaan dan Pekerja	Perusahaan dan Pekerja	Kota Makassar	Kota Makassar	1 Keg	1 Keg	14.472.000	11.018.000	(3.454.000)	APBD	APBD	1	14.472.000	b	Dianaker
					Jumlah Pembinaan Jamminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Pembinaan Jamminan Sosial Tenaga Kerja					50 Prshn	50 Prshn						50			
2	2.07	05	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pertemuan LKS yang dilaksanakan	Perusahaan dan Pekerja	Perusahaan dan Pekerja	Kota Makassar	Kota Makassar	12 Kali	7 Kali	194.940.000	159.568.000	(35.372.000)	APBD	APBD	12	194.940.000	b	Dianaker

**TABEL 2.2**  
**PERBANDINGAN ANTARA PROGRAM/KEGIATAN DALAM RENJA DAN DPA**  
**DINAS KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA KINERJA DAN ANGGARAN DALAM DOKUMEN RENJA TAHUN ANGGARAN 2021		RENCANA KINERJA DAN ANGGARAN DALAM DOKUMEN DPA TAHUN ANGGARAN 2021		Catatan Penting
							K	Rp	K	Rp	
(1)					(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2					<b>URUSAN WAJIB</b>						
2	2.07				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>			<b>16.214.889.151</b>		<b>16.214.889.151</b>	
2	2.07	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>PERSENTASE KETERSEDIAAN LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>100%</b>	<b>9.130.348.820</b>	<b>100%</b>	<b>9.130.348.820</b>	
					<b>INDEKS KEPUASAN ASN PERANGKAT DAERAH TERHADAP PELAYANAN KESEKRETARIATAN (KEPEGAWAIAAN, PERLENGKAPAN, DAN KEUANGAN)</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>				
					<b>PERSENTASE ASN PERANGKAT DAERAH YANG MENDAPAT PENINGKATAN KAPASITAS</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>				
					<b>PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA APARATUR DALAM KONDISI BAIK</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>				
2	2.07	01	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat</b>	<b>11 Dok</b>	<b>128.638.000</b>	<b>11 Dok</b>	<b>128.638.000</b>	
2	2.07	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah	2 Dok	69.599.000	2 Dok	69.599.000	
						Jumlah Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah	1 Dok		1 Dok		
2	2.07	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	11.034.000	1 Dok	11.034.000	
2	2.07	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	10.329.000	1 Dok	10.329.000	
2	2.07	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	8.717.000	1 Dok	8.717.000	
2	2.07	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	8.552.000	1 Dok	8.552.000	
2	2.07	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah	1 Dok	11.384.000	1 Dok	11.384.000	

					Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	1 Dok		1 Dok		
2	2.07	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	1 Dok	9.023.000	1 Dok	9.023.000	
						Jumlah Penyusunan Dokumen LAKIP Perangkat Daerah	1 Dok		1 Dok		
<b>2</b>	<b>2.07</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersusun</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>7.650.632.949</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>7.650.632.949</b>	
2	2.07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	7.308.872.949	12 Bulan	7.308.872.949	
2	2.07	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pengelolaan Administrasi Keuangan	12 Bulan	245.760.000	12 Bulan	245.760.000	
2	2.07	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	96.000.000	12 Bulan	96.000.000	
<b>2</b>	<b>2.07</b>	<b>01</b>	<b>2.03</b>		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersusun</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>103.752.800</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>103.752.800</b>	
2	2.07	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Jasa Pengamanan Gedung Kantor	12 Bulan	41.720.400	12 Bulan	41.720.400	
2	2.07	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	62.032.400	12 Bulan	62.032.400	
<b>2</b>	<b>2.07</b>	<b>01</b>	<b>2.05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>3 Jenis</b>	<b>126.621.400</b>	<b>3 Jenis</b>	<b>126.621.400</b>	
2	2.07	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	108 Psg	64.800.000	108 Psg	64.800.000	
2	2.07	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pelayanan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Bulan	61.821.400	12 Bulan	61.821.400	
2	2.07	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diadakan	0 orang	0	0 orang	0	
<b>2</b>	<b>2.07</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Jasa Adminitrasi Umum yang Tersedia</b>	<b>8 Jenis</b>	<b>263.509.382</b>	<b>8 Jenis</b>	<b>263.509.382</b>	
2	2.07	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	8 Jenis	14.299.750	8 Jenis	14.299.750	
2	2.07	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	84.654.632	12 Bulan	84.654.632	
2	2.07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak	4 Jenis	17.190.000	4 Jenis	17.190.000	
2	2.07	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan	12 Bulan	19.500.000	12 Bulan	19.500.000	
2	2.07	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu	12 Bulan	17.865.000	12 Bulan	17.865.000	
2	2.07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyediaan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	12 Bulan	110.000.000	12 Bulan	110.000.000	

2	2.07	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Pengadaan BMD</b>	<b>3 Unit</b>	<b>68.042.269</b>	<b>3 Unit</b>	<b>68.042.269</b>	
2	2.07	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Mesin Fotocopy	1 Unit	68.042.269	1 Unit	68.042.269	
					Jumlah Pengadaan AC	1 Unit	1 Unit				
					Jumlah Pengadaan Hardisk External	1 Unit	1 Unit				
					Jumlah Pengadaan Printer	1 Unit	1 Unit				
2	2.07	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang</b>	<b>3 Jenis</b>	<b>486.462.220</b>	<b>3 Jenis</b>	<b>486.462.220</b>	
2	2.07	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan	12 Bulan	147.740.600	12 Bulan	147.740.600	
2	2.07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	263.544.020	12 Bulan	263.544.020	
2	2.07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan	12 Bulan	75.177.600	12 Bulan	75.177.600	
					Jumlah Penyediaan Kebersihan Kantor	12 Bulan	12 Bulan				
2	2.07	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>4 Jenis</b>	<b>302.689.800</b>	<b>4 Jenis</b>	<b>302.689.800</b>	
2	2.07	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Mobil Jabatan Secara Rutin/berkala	1 Unit	30.324.000	1 Unit	30.324.000	
2	2.07	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Bus Pekerja Secara Rutin/Berkala	1 Unit	238.445.800	1 Unit	238.445.800	
					Jumlah Pemeliharaan Mobil Operasional Secara Rutin/Berkala	6 Unit	6 Unit				
					Jumlah Pemeliharaan Motor Operasional Secara Rutin/Berkala	7 Unit	7 Unit				
2	2.07	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Komputer/ Laptop Secara Rutin/Berkala	15 Unit	33.920.000	15 Unit	33.920.000	
					Jumlah Pemeliharaan Printer Secara Rutin/Berkala	5 Unit	5 Unit				
					Jumlah Pemeliharaan AC Secara Rutin/Berkala	8 Unit	8 Unit				
2	2.07	2			<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>	<b>PERSENTASE KEBUTUHAN PERENCANAAN TENAGA KERJA YANG DISUSUN</b>	<b>50%</b>	<b>46.860.000</b>	<b>50%</b>	<b>46.860.000</b>	
2	2.07	2	2.01		<b>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</b>	<b>Jumlah Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang disusun</b>	<b>1 Dok</b>	<b>46.860.000</b>	<b>1 Dok</b>	<b>46.860.000</b>	
2	2.07	2	2.01	02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	50 Orang	46.860.000	50 Orang	46.860.000	
2	2.07	3			<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>PERSENTASE TENAGA KERJA YANG MENDAPATKAN PELATIHAN BERBASIS MASYARAKAT</b>	<b>90%</b>	<b>4.206.816.650</b>	<b>90%</b>	<b>4.206.816.650</b>	



2	2.07	3	2.01		<b>Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi</b>	<b>Jumlah Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi yang dilaksanakan</b>	<b>8 Jenis</b>	<b>3.433.153.050</b>	<b>8 Jenis</b>	<b>3.433.153.050</b>	
2	2.07	3	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan	620 Orang	3.178.930.050	620 Orang	3.178.930.050	
2	2.07	3	2.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja yang dilaksanakan	240 Orang	254.223.000	240 Orang	254.223.000	
2	2.07	3	2.02		<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>	<b>Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Mendapat Pembinaan</b>	<b>75 LPK</b>	<b>94.622.000</b>	<b>75 LPK</b>	<b>94.622.000</b>	
2	2.07	3	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	6 Kali	94.622.000	6 Kali	94.622.000	
					Jumlah peserta Pelatihan Penatausahaan Lembaga Pelatihan swasta (LPK)	75 Orang	75 Orang				
2	2.07	3	2.03		<b>Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja</b>	<b>Jumlah Penyediaan Jasa Perizinan dan Pendaftaran</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>234.161.600</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>234.161.600</b>	
2	2.07	3	2.03	01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Jumlah Peserta Bimtek Penyuluhan Standar Mutu dan Tata Kelola LPK	75 Orang	234.161.600	75 Orang	234.161.600	
					Jumlah Pelayanan Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan				
2	2.07	3	2.04		<b>Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil</b>	<b>Jumlah Perusahaan Kecil yang mendapat Konsultasi Produktivitas</b>	<b>200 Prshn</b>	<b>150.846.000</b>	<b>200 Prshn</b>	<b>150.846.000</b>	
2	2.07	3	2.04	01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Pembinaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil yang dilaksanakan	200 Orang	150.846.000	200 Orang	150.846.000	
2	2.07	3	2.05		<b>Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Pengukuran Produktifitas Perusahaan</b>	<b>100 Prshn</b>	<b>294.034.000</b>	<b>100 Prshn</b>	<b>294.034.000</b>	
2	2.07	3	2.05	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Pengukuran Produktifitas Perusahaan	25 Prshn	294.034.000	25 Prshn	294.034.000	
					Jumlah Peserta Pelatihan Bahasa Asing	80 Orang	80 Orang				
					Jumlah Peserta Pelatihan Matematika	0 Orang	0 Orang				
					Jumlah Seleksi Pemagangan	0 Keg	0 Keg				
2	2.07	4			<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>BESARAN PENCARI KERJA YANG TERDAFTAR YANG DITEMPATKAN</b>	<b>86%</b>	<b>2.195.572.481</b>	<b>86%</b>	<b>2.195.572.481</b>	
2	2.07	4	2.01		<b>Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Pelayanan Antarkerja di Kota Makassar</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>1.685.374.331</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>1.685.374.331</b>	
2	2.07	4	2.01	01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah Dokumen Pemutakhiran Database Ketenagakerjaan	1 Dok	178.408.800	1 Dok	178.408.800	
					Jumlah Pelayanan Antar Kerja	12 Bulan	12 Bulan				

2	2.07	4	2.01	04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Peserta FGD Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	200 Orang	47.503.000	200 Orang	47.503.000	
2	2.07	4	2.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah peserta pembinaan tenaga kerja mandiri	76 Orang	1.459.462.531	76 Orang	1.459.462.531	
						Jumlah lokasi padat karya infrastruktur	3 Lokasi		3 Lokasi		
<b>2</b>	<b>2.07</b>	<b>4</b>	<b>2.02</b>		<b>Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah Pelayanan Penerbitan rekomendasi Penerbitan Izin LPTKS</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>72.905.400</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>72.905.400</b>	
2	2.07	4	2.02	01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi yang disediakan	12 Bulan	61.041.400	12 Bulan	61.041.400	
2	2.07	4	2.02	02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	4 Keg	11.864.000	4 Keg	11.864.000	
<b>2</b>	<b>2.07</b>	<b>4</b>	<b>2.03</b>		<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	<b>Jumlah Informasi Pasar Kerja yang dikelola</b>	<b>12.000 Loker</b>	<b>373.368.500</b>	<b>12.000 Loker</b>	<b>373.368.500</b>	
2	2.07	4	2.03	01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	12 Bulan	23.232.000	12 Bulan	23.232.000	
2	2.07	4	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	12 Bulan	225.794.500	12 Bulan	225.794.500	
2	2.07	4	2.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pelaksanaan Job Fair/Bursa Kerja	1 Kali	124.342.000	1 Kali	124.342.000	
<b>2</b>	<b>2.07</b>	<b>4</b>	<b>2.04</b>		<b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah PMI Purna Penempatan yang Diberi Pembekalan Pelatihan</b>	<b>20 Orang</b>	<b>63.924.250</b>	<b>20 Orang</b>	<b>63.924.250</b>	
2	2.07	4	2.04	01	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (calon/purna yang diberikan pembinaan)	20 Orang	63.924.250	20 Orang	63.924.250	
<b>2</b>	<b>2.07</b>	<b>5</b>			<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>ANGKA SENGKETA PERUSAHAAN-PEKERJA PERTAHUN</b>	<b>2,50%</b>	<b>635.291.200</b>	<b>2,50%</b>	<b>635.291.200</b>	
						<b>PERSENTASE KASUS HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG DISELESAIKAN DENGAN PERJANJIAN BERSAMA (PB)</b>	<b>96,00%</b>		<b>96,00%</b>		
<b>2</b>	<b>2.07</b>	<b>5</b>	<b>2.01</b>		<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya</b>	<b>Jumlah Pelayanan Pengesahan PP dan pelayanan Pendaftaran PKB</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>253.240.000</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>253.240.000</b>	
2	2.07	5	2.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Pembinaan dan Pemantauan Outsourcing dan Pemborongan	60 Prshn	48.739.000	60 Prshn	48.739.000	
						Jumlah Pembinaan PKWT	60 Prshn		60 Prshn		
2	2.07	5	2.01	02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Pembinaan dan Pemantauan PP/PKB (Pembinaan PP/PKB)	2 Kali	26.759.000	2 Kali	26.759.000	
2	2.07	5	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan	Jumlah Pembinaan dan Pemantauan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	4 Triwln	177.742.000	4 Triwln	177.742.000	

					Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Pembinaan dan Pemantauan Upah Minimum Kota	4 Triwln		4 Triwln	
						Jumlah Penetapan Upah Minimum	1 UMK		1 UMK	
<b>2</b>	<b>2.07</b>	<b>5</b>	<b>2.02</b>		<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>382.051.200</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>382.051.200</b>
2	2.07	5	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dialog Ketenagakerjaan (Mayday)	2 Keg	24.082.000	2 Keg	24.082.000
						Jumlah Penetapan Upah Minimum Kota	2 Keg		2 Keg	
2	2.07	5	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pelayanan mediasi pengaduan perselisihan hubungan industrial	12 Bulan	187.383.200	12 Bulan	187.383.200
						Jumlah Peserta Temu Teknis Penegakan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	50 orang		50 orang	
2	2.07	5	2.02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Pembinaan dan Pemantauan Tujangan Hari Raya ( THR )	1 Keg	11.018.000	1 Keg	11.018.000
						Jumlah Pembinaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	50 Prshn		50 Prshn	
2	2.07	5	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pertemuan LKS yang dilaksanakan	12 Kali	159.568.000	12 Kali	159.568.000
								<b>16.214.889.151</b>		<b>16.214.889.151</b>

Jumlah Program dan Kegiatan yang terlaksana dan tidak terlaksana antara Renja tahun 2021 dengan DPA Tahun 2021 Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, dapat dilihat pada tabel 2.2 di bawah ini :

**Tabel. 2.3**  
**Analisis Perbandingan Program dan Kegiatan**  
**Antara Renja Tahun 2020 dan Perubahan Renja Tahun 2020**  
**Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar**

<b>NO.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>RENJA</b>	<b>DPA</b>	<b>CATATAN</b>
1.	Program	5	5	
2.	Kegiatan	17	17	
3.	Anggaran	18.052.000.000	18.052.000.000	

# BAB 3

## CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2021 dijadikan sebagai landasan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar dalam merumuskan kebijakan.

Untuk mewujudkan “Ketenagakerjaan yang mandiri, berdaya saing, harmonis dan sejahtera untuk semua”, Dinas Ketenagakerjaan berupaya melaksanakannya dengan program-program pembangunan yang telah direncanakan. Selama tahun 2021, Dinas Ketenagakerjaan telah melaksanakan 5 program dengan 17 kegiatan, dengan alokasi anggaran belanja daerah sebesar Rp.18.052.000.000,- (delapan belas milyar lima puluh dua juta rupiah) yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp. 17.953.502.500,- (tujuh belas milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua ribu lima ratus rupiah) dan belanja modal sebesar Rp. 98.497.500,- (sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Dalam pelaksanaan mengalami beberapa perubahan yang tertuang dalam Dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021 dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2021 berkurang sebesar Rp. 1.837.110.849,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah) atau sebesar 10,18 persen menjadi Rp. 16.214.889.151 (enam belas milyar dua ratus empat belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus lima puluh satu rupiah).

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara melakukan pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Pasal 289) dan evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah (Pasal 301).

### **3.1. Pengendalian Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah**

Pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289, mencakup program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja serta kelompok sasaran, dilakukan melalui pemantauan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah.

Hasil pemantauan digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, dana indikatif yang disusun ke dalam RKA Perangkat Daerah sesuai dengan Renja Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar menggunakan Formulir E.75 sebagaimana tertuang pada tabel 3.1 berikut:

**TABEL 3.1 (FORMAT E.75)  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH**

KABUPATEN/KOTA : KOTA MAKASSAR  
 PERANGKAT DAERAH : DINAS KETENAGAKERJAAN  
 PERIODE RENJA PERANGKAT DAERAH : TAHUN 2021  
 PERIODE RKA PERANGKAT DAERAH : TAHUN 2021

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/	RENCANA KINERJA TAHUN 2021						KESESUAIAN		EVALUASI	TINDAK LANJUT			
			LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA		DANA		YA	TIDAK					
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)			
		RENJA	DPA		RENJA	DPA	RENJA	DPA	RENJA	DPA	YA	TIDAK			
2			<b>URUSAN WAJIB</b>												
2	2.07		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>												
2	2.07	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE KETERSEDIAAN LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	PERSENTASE KETERSEDIAAN LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	Kota Makassar	Kota Makassar	100%	100%	9.130.348.820	9.130.348.820	Ya			
				INDEKS KEPUASAN ASN PERANGKAT DAERAH TERHADAP PELAYANAN KESEKRETARIATAN (KEPEGAWAIAN, PERLENGKAPAN, DAN KEUANGAN)	INDEKS KEPUASAN ASN PERANGKAT DAERAH TERHADAP PELAYANAN KESEKRETARIATAN (KEPEGAWAIAN, PERLENGKAPAN, DAN KEUANGAN)			90%	90%						
				PERSENTASE ASN PERANGKAT DAERAH YANG MENDAPAT PENINGKATAN KAPASITAS	PERSENTASE ASN PERANGKAT DAERAH YANG MENDAPAT PENINGKATAN KAPASITAS			90%	90%						
				PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA APARATUR DALAM KONDISI BAIK	PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA APARATUR DALAM KONDISI BAIK			90%	90%						
2	2.07	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar	Kota Makassar	11 Dok	11 Dok	128.638.000	128.638.000	Ya		
2	2.07	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah	Kota Makassar	Kota Makassar	2 Dok	2 Dok	69.599.000	69.599.000	Ya		
					Jumlah Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah			1 Dok	1 Dok					
2	2.07	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Makassar	Kota Makassar	1 Dok	1 Dok	11.034.000	11.034.000	Ya		
2	2.07	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Makassar	Kota Makassar	1 Dok	1 Dok	10.329.000	10.329.000	Ya		
2	2.07	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Makassar	Kota Makassar	1 Dok	1 Dok	8.717.000	8.717.000	Ya		
2	2.07	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Makassar	Kota Makassar	1 Dok	1 Dok	8.552.000	8.552.000	Ya		
2	2.07	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar	Kota Makassar	1 Dok	1 Dok	11.384.000	11.384.000	Ya		
					Jumlah Penyusunan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah			1 Dok	1 Dok					
2	2.07	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Kota Makassar	Kota Makassar	1 Dok	1 Dok	9.023.000	9.023.000	Ya		
					Jumlah Penyusunan Dokumen LAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen LAKIP Perangkat Daerah	Kota Makassar	Kota Makassar	1 Dok	1 Dok			Ya		
2	2.07	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersusun	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersusun	Kota Makassar	Kota Makassar	12 Bulan	12 Bulan	7.650.632.949	7.650.632.949	Ya		
2	2.07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Makassar	Kota Makassar	12 Bulan	12 Bulan	7.308.872.949	7.308.872.949	Ya		
2	2.07	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kota Makassar	Kota Makassar	12 Bulan	12 Bulan	245.760.000	245.760.000	Ya		
2	2.07	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Makassar	Kota Makassar	12 Bulan	12 Bulan	96.000.000	96.000.000	Ya		
2	2.07	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersusun	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersusun	Kota Makassar	Kota Makassar	12 Bulan	12 Bulan	103.752.800	103.752.800	Ya		





2	2.07	2	2.01	02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kota Makassar	Kota Makassar	50 Orang	50 Orang	46.860.000	46.860.000	Ya			
2	2.07	3			<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>PERSENTASE TENAGA KERJA YANG MENDAPATKAN PELATIHAN BERBASIS MASYARAKAT</b>	<b>PERSENTASE TENAGA KERJA YANG MENDAPATKAN PELATIHAN BERBASIS MASYARAKAT</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>4.206.816.650</b>	<b>4.206.816.650</b>	<b>Ya</b>			
2	2.07	3	2.01		<b>Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi</b>	<b>Jumlah Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi yang dilaksanakan</b>	<b>Jumlah Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi yang dilaksanakan</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>8 Jenis</b>	<b>8 Jenis</b>	<b>3.433.153.050</b>	<b>3.433.153.050</b>	<b>Ya</b>			
2	2.07	3	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan	Kota Makassar	Kota Makassar	620 Orang	620 Orang	3.178.930.050	3.178.930.050	Ya			
2	2.07	3	2.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja yang dilaksanakan	Jumlah Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja yang dilaksanakan	Kota Makassar	Kota Makassar	240 Orang	240 Orang	254.223.000	254.223.000	Ya			
2	2.07	3	2.02		<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>	<b>Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Mendapat Pembinaan</b>	<b>Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Mendapat Pembinaan</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>75 LPK</b>	<b>75 LPK</b>	<b>94.622.000</b>	<b>94.622.000</b>	<b>Ya</b>			
2	2.07	3	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Makassar	Kota Makassar	6 Kali	6 Kali	94.622.000	94.622.000	Ya			
						Jumlah peserta Pelatihan Penatausahaan Lembaga Pelatihan swasta (LPK)	Jumlah peserta Pelatihan Penatausahaan Lembaga Pelatihan swasta (LPK)			75 Orang	75 Orang						
2	2.07	3	2.03		<b>Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja</b>	<b>Jumlah Penyediaan Jasa Perizinan dan Pendaftaran</b>	<b>Jumlah Penyediaan Jasa Perizinan dan Pendaftaran</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>234.161.600</b>	<b>234.161.600</b>	<b>Ya</b>			
2	2.07	3	2.03	01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Jumlah Peserta Bimtek Penyuluhan Standar Mutu dan Tata Kelola LPK	Jumlah Peserta Bimtek Penyuluhan Standar Mutu dan Tata Kelola LPK	Kota Makassar	Kota Makassar	75 Orang	75 Orang	234.161.600	234.161.600	Ya			
						Jumlah Pelayanan Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi yang disediakan	Jumlah Pelayanan Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi yang disediakan			12 Bulan	12 Bulan						
2	2.07	3	2.04		<b>Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil</b>	<b>Jumlah Perusahaan Kecil yang mendapat Konsultasi Produktivitas</b>	<b>Jumlah Perusahaan Kecil yang mendapat Konsultasi Produktivitas</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>200 Prshn</b>	<b>200 Prshn</b>	<b>150.846.000</b>	<b>150.846.000</b>	<b>Ya</b>			
2	2.07	3	2.04	01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil yang dilaksanakan	Jumlah Pembinaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil yang dilaksanakan	Jumlah Pembinaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil yang dilaksanakan	Kota Makassar	Kota Makassar	200 Orang	200 Orang	150.846.000	150.846.000	Ya			
2	2.07	3	2.05		<b>Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Pengukuran Produktifitas Perusahaan</b>	<b>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Pengukuran Produktifitas Perusahaan</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>100 Prshn</b>	<b>100 Prshn</b>	<b>294.034.000</b>	<b>294.034.000</b>	<b>Ya</b>			
2	2.07	3	2.05	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Pengukuran Produktifitas Perusahaan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Pengukuran Produktifitas Perusahaan	Kota Makassar	Kota Makassar	25 Prshn	25 Prshn	294.034.000	294.034.000	Ya			
						Jumlah Peserta Pelatihan Bahasa Asing	Jumlah Peserta Pelatihan Bahasa Asing			80 Orang	80 Orang						
						Jumlah Peserta Pelatihan Matematika	Jumlah Peserta Pelatihan Matematika			0 Orang	0 Orang						
						Jumlah Seleksi Pemagangan	Jumlah Seleksi Pemagangan			0 Keg	0 Keg						
2	2.07	4			<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>BESARAN PENCARI KERJA YANG TERDAFTAR YANG DITEMPATKAN</b>	<b>BESARAN PENCARI KERJA YANG TERDAFTAR YANG DITEMPATKAN</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>86%</b>	<b>86%</b>	<b>2.195.572.481</b>	<b>2.195.572.481</b>	<b>Ya</b>			
2	2.07	4	2.01		<b>Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Pelayanan Antarkerja di Kota Makassar</b>	<b>Jumlah Pelayanan Antarkerja di Kota Makassar</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>1.685.374.331</b>	<b>1.685.374.331</b>	<b>Ya</b>			
2	2.07	4	2.01	01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah Dokumen Pemutakhiran Database Ketenagakerjaan	Jumlah Dokumen Pemutakhiran Database Ketenagakerjaan	Kota Makassar	Kota Makassar	1 Dok	1 Dok	178.408.800	178.408.800	Ya			
						Jumlah Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Pelayanan Antar Kerja			12 Bulan	12 Bulan						
2	2.07	4	2.01	04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Peserta FGD Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Peserta FGD Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Kota Makassar	Kota Makassar	200 Orang	200 Orang	47.503.000	47.503.000	Ya			
2	2.07	4	2.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah peserta pembinaan tenaga kerja mandiri	Jumlah peserta pembinaan tenaga kerja mandiri	Kota Makassar	Kota Makassar	76 Orang	76 Orang	1.459.462.531	1.459.462.531	Ya			
						Jumlah lokasi padat karya infrastruktur	Jumlah lokasi padat karya infrastruktur			3 Lokasi	3 Lokasi						
2	2.07	4	2.02		<b>Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah Pelayanan Penerbitan rekomendasi Penerbitan Izin LPTKS</b>	<b>Jumlah Pelayanan Penerbitan rekomendasi Penerbitan Izin LPTKS</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>72.905.400</b>	<b>72.905.400</b>	<b>Ya</b>			
2	2.07	4	2.02	01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi yang disediakan	Jumlah Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi yang disediakan	Jumlah Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi yang disediakan	Kota Makassar	Kota Makassar	12 Bulan	12 Bulan	61.041.400	61.041.400	Ya			
2	2.07	4	2.02	02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Kota Makassar	Kota Makassar	4 Keg	4 Keg	11.864.000	11.864.000	Ya			
2	2.07	4	2.03		<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	<b>Jumlah Informasi Pasar Kerja yang dikelola</b>	<b>Jumlah Informasi Pasar Kerja yang dikelola</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>12.000 Loker</b>	<b>12.000 Loker</b>	<b>373.368.500</b>	<b>373.368.500</b>	<b>Ya</b>			

2	2.07	4	2.03	01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kota Makassar	Kota Makassar	12 Bulan	12 Bulan	23.232.000	23.232.000	Ya			
2	2.07	4	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kota Makassar	Kota Makassar	12 Bulan	12 Bulan	225.794.500	225.794.500	Ya			
2	2.07	4	2.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pelaksanaan Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pelaksanaan Job Fair/Bursa Kerja	Kota Makassar	Kota Makassar	1 Kali	1 Kali	124.342.000	124.342.000	Ya			
2	2.07	4	2.04		<b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah PMI Purna Penempatan yang Diberi Pembekalan Pelatihan</b>	<b>Jumlah PMI Purna Penempatan yang Diberi Pembekalan Pelatihan</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>20 Orang</b>	<b>20 Orang</b>	<b>63.924.250</b>	<b>63.924.250</b>	<b>Ya</b>			
2	2.07	4	2.04	01	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (calon/purna yang diberikan pembinaan)	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (calon/purna yang diberikan pembinaan)	Kota Makassar	Kota Makassar	20 Orang	20 Orang	63.924.250	63.924.250	Ya			
2	2.07	5			<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>ANGKA SENGKETA PERUSAHAAN-PEKERJA PERTAHUN</b>	<b>ANGKA SENGKETA PERUSAHAAN-PEKERJA PERTAHUN</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>2,50%</b>	<b>2,50%</b>	<b>635.291.200</b>	<b>635.291.200</b>	<b>Ya</b>			
						<b>PERSENTASE KASUS HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG DISELESAIKAN DENGAN PERJANJIAN BERSAMA (PB)</b>	<b>PERSENTASE KASUS HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG DISELESAIKAN DENGAN PERJANJIAN BERSAMA (PB)</b>			<b>96,00%</b>	<b>96,00%</b>						
2	2.07	5	2.01		<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya</b>	<b>Jumlah Pelayanan Pengesahan PP dan pelayanan Pendaftaran PKB</b>	<b>Jumlah Pelayanan Pengesahan PP dan pelayanan Pendaftaran PKB</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>253.240.000</b>	<b>253.240.000</b>	<b>Ya</b>			
2	2.07	5	2.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Pembinaan dan Pemantauan Outsourcing dan Pemborongan	Jumlah Pembinaan dan Pemantauan Outsourcing dan Pemborongan	Kota Makassar	Kota Makassar	60 Prshn	60 Prshn	48.739.000	48.739.000	Ya			
						Jumlah Pembinaan PKWT	Jumlah Pembinaan PKWT			60 Prshn	60 Prshn						
2	2.07	5	2.01	02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Pembinaan dan Pemantauan PP/PKB (Pembinaan PP/PKB)	Pembinaan dan Pemantauan PP/PKB (Pembinaan PP/PKB)	Kota Makassar	Kota Makassar	2 Kali	2 Kali	26.759.000	26.759.000	Ya			
2	2.07	5	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Pembinaan dan Pemantauan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Pembinaan dan Pemantauan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Kota Makassar	Kota Makassar	4 Triwln	4 Triwln	177.742.000	177.742.000	Ya			
						Jumlah Pembinaan dan Pemantauan Upah Minimum Kota	Jumlah Pembinaan dan Pemantauan Upah Minimum Kota			4 Triwln	4 Triwln						
						Jumlah Penetapan Upah Minimum	Jumlah Penetapan Upah Minimum			1 UMK	1 UMK						
2	2.07	5	2.02		<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan</b>	<b>Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>382.051.200</b>	<b>382.051.200</b>	<b>Ya</b>			
2	2.07	5	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dialog Ketenagakerjaan (Mayday)	Jumlah Dialog Ketenagakerjaan (Mayday)	Kota Makassar	Kota Makassar	2 Keg	2 Keg	24.082.000	24.082.000	Ya			
						Jumlah Penetapan Upah Minimum Kota	Jumlah Penetapan Upah Minimum Kota			2 Keg	2 Keg						
2	2.07	5	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pelayanan mediasi pengaduan perselisihan hubungan industrial	Jumlah pelayanan mediasi pengaduan perselisihan hubungan industrial	Kota Makassar	Kota Makassar	12 Bulan	12 Bulan	187.383.200	187.383.200	Ya			
						Jumlah Peserta Temu Teknis Penegakan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah Peserta Temu Teknis Penegakan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial			50 orang	50 orang						
2	2.07	5	2.02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Pembinaan dan Pemantauan Tunjangan Hari Raya (THR)	Jumlah Pembinaan dan Pemantauan Tunjangan Hari Raya (THR)	Kota Makassar	Kota Makassar	1 Keg	1 Keg	11.018.000	11.018.000	Ya			
						Jumlah Pembinaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Pembinaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja			50 Prshn	50 Prshn						
2	2.07	5	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pertemuan LKS yang dilaksanakan	Jumlah pertemuan LKS yang dilaksanakan	Kota Makassar	Kota Makassar	12 Kali	12 Kali	159.568.000	159.568.000	Ya			
												<b>16.214.889.151</b>	<b>16.214.889.151</b>				

### **3.2. Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah**

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2021 dimaksudkan untuk mengidentifikasi perubahan-perubahan, kecenderungan perkembangan internal dan eksternal yang diperkirakan akan mempengaruhi kinerja pelayanan kepada bidang ketenagakerjaan dan merumuskan apa yang perlu dilakukan agar kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar dapat ditingkatkan lebih efektif dan efisien.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021, adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan bidang ketenagakerjaan pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 direncanakan dalam 5 Program terdiri dari 4 Program Urusan Wajib (2 Program Prioritas dan 2 Program Utama) dan 1 Program Penunjang yang dijabarkan dalam 20 Kegiatan dan 51 subkegiatan;
2. Lokasi program dan kegiatan tersebar pada semua Kecamatan se Kota Makassar, yang secara lebih spesifik kelompok sasaran yang dituju adalah para pencari kerja, tenaga kerja/buruh, organisasi pekerja/buruh, perusahaan, lembaga pelatihan kerja, dan masyarakat umum lainnya yang membutuhkan pelayanan di bidang ketenagakerjaan serta perangkat daerah;
3. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dibutuhkan untuk tahun anggaran 2021, adalah : Rp. 18.049.000.000,- (delapan belas milyar empat puluh sembilan juta rupiah), dimana dari usulan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kota Makassar sebanyak 31 usulan kegiatan yang terakomodir oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar sebanyak 26 usulan kegiatan;
4. Pada Perubahan Pagu indikatif sebesar Rp. 16.214.889.151,- (enam belas milyar dua ratus empat belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus lima puluh satu rupiah), berkurang sebanyak Rp. 1.837.110.849,00,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh tujuh

juta seratus sepuluh ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah) atau berkurang 10,18 persen

Realisasi capaian target kinerja 5 program tahun 2021 yaitu 2 (dua) program capaian berkinerja sangat tinggi ( $91\% \leq 100\%$ ); 2 (dua) program capaian berkinerja tinggi ( $76\% \leq 90\%$ ) dan 1 (satu) program capaian berkinerja sedang ( $66\% \leq 75\%$ ).

Adapun rata-rata capaian kinerja 5 program adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Rata-Rata Capaian Kinerja Program Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2021**

Program/Indikator Program	Target	Realisasi	Capaian
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>			
Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	100,00%	50,00%	50,00%
Indeks Kepuasan Asn Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan (Kepegawaiaan, Perlengkapan, Dan Keuangan)	90,00%	0,00%	0,00%
Persentase Asn Perangkat Daerah Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	90,00%	0,00%	0,00%
Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	90,00%	30,00%	33,33%
<b>Program Perencanaan Tenaga Kerja</b>			
Persentase Kebutuhan Perencanaan Tenaga Kerja Yang Disusun	50,00%	0,00%	0,00%
<b>Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>			
Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat	90,00%	0,00%	0,00%
Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	80,00%	0,00%	0,00%
<b>Program Penempatan Tenaga Kerja</b>			
Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan	86,00%	54,37%	63,47%
<b>Program Hubungan Industrial</b>			
Angka sengketa perselisihan hubungan industrial pertahun	2,5%	0,00%	0,00%
Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	96,00%	76,12%	79,29%

Adapun rincian capaian kinerja 5 program adalah sebagai berikut :

## 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%
Indeks Kepuasan ASN-PD Terhadap Pelayanan Kesekretariatan (Kepegawaiaan, Perlengkapan, & Keuangan)	90%	90%	88,50%	98,33%
Persentase ASN Perangkat Daerah Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	90%	90%	65%	72,22%
Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	90%	90%	90%	100%

Rata-rata capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota sebesar 85,88 persen atau kategori berkinerja tinggi. Adapun analisa capaian program di atas sebagai berikut :

- Dari target 100 persen Ketersediaan Laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah terealisasi sebesar 100 persen atau dengan capaian sebesar 100 persen;
- Dari target 90 persen Indeks Kepuasan ASN Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan (Kepegawaiaan, Perlengkapan, Dan Keuangan) terealisasi sebesar 88,50 persen atau dengan capaian sebesar 98,33 persen;
- Dari target 90 persen ASN Perangkat Daerah Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas, terealisasi sebesar 65 persen atau dengan capaian sebesar 72,22 persen;
- Dari target 90 persen Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik terealisasi sebesar 90 persen atau dengan capaian sebesar 100 persen.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dan 27 (dua puluh

tujuh) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp. 9.185.348.820,- (sembilan milyar seratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.680.154.223,- (delapan milyar enam ratus delapan puluh juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah) atau sebesar 94,50 persen.

Adapun beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan pencapaian target/kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tahun 2021 diuraikan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi mengalami refocusing sehingga tidak ada anggaran untuk memberikan pelatihan bagi ASN;

Adapun beberapa faktor pendorong dalam pelaksanaan pencapaian target/kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tahun 2021 diuraikan sebagai berikut :

- a. Ketersediaan anggaran;
- b. Komitmen pimpinan dan ASN Lingkup Dinas Ketenagakerjaan dalam pemberian pelayanan.

Adapun tindak lanjut yang dianggap perlu untuk dilaksanakan untuk mengoptimalkan realisasi capaian kinerja antara lain :

- a. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pelayanan ketenagakerjaan untuk menunjang mempercepat sertifikasi pekerja melalui pengelolaan program pelatihan yang komprehensif;

## 2. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Kebutuhan Perencanaan Tenaga Kerja Yang Disusun	0%	50%	50%	100%

Dimana tahun 2021 rata-rata capaian kinerja program sebesar 100 persen dengan rincian sebagai berikut :

- Dari target 50 persen Kebutuhan Perencanaan Tenaga Kerja Yang Disusun terealisasi sebesar 50 persen atau dengan capaian sebesar 100 persen.

Program Perencanaan Tenaga Kerja terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp. 44.136.000,- (empat puluh empat juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar 43.887.600,- (empat puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) atau sebesar 93,66 persen.

Adapun beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan pencapaian target/kinerja Program Perencanaan Tenaga Kerja tahun 2021 diuraikan sebagai berikut :

- a. Beberapa item rincian anggaran tidak dicairkan dalam rangka efisiensi akan tetapi tidak mengganggu pelaksanaan subkegiatan;

Adapun beberapa faktor pendorong dalam pelaksanaan pencapaian target/kinerja Program Perencanaan Tenaga Kerja tahun 2021 diuraikan sebagai berikut :

- a. Terbentuknya Forum HRD.

Adapun tindak lanjut yang dianggap perlu untuk dilaksanakan untuk mengoptimalkan realisasi capaian kinerja antara lain :

- a. Mengoptimalkan komunikasi antara semua pihak yang berkepentingan dan meningkatkan fungsi kaidah-kaidah hukum ketenagakerjaan sebagai rambu-rambunya;
- b. Lebih melibatkan Forum HRD yang sudah di bentuk dalam penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Mikro;
- c. Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Makro pada tahun 2022 akan melibatkan semua unsur yang berkepentingan dalam bidang Ketenagakerjaan.

### 3. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat	100%	90%	90,25%	100,27%
Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	90%	80%	57,40%	71,76%

Dimana tahun 2021 rata-rata capaian kinerja program sebesar 86,02 persen dengan rincian sebagai berikut :

- Dari target 90 persen Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat terealisasi sebesar 90,25 persen atau dengan capaian sebesar 100,27 persen dimana dari 687 orang orang yang mendaftar sebanyak 620 orang yang mendapatkan pelatihan;
- Dari target 80 persen Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi terealisasi sebesar 57,40 persen atau dengan capaian sebesar 71,76 persen dimana dari 601 orang orang yang mendaftar sebanyak 345 orang yang mendapatkan pelatihan.

Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja terdiri dari 5 (lima) kegiatan dan 6 (enam) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp. 4.206.816.650,- (empat milyar dua ratus enam juta delapan ratus enam belas ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.772.050.104,- (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta lima puluh ribu seratus empat rupiah) atau sebesar 89,67 persen.

Adapun beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan pencapaian target/kinerja Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja tahun 2021 diuraikan sebagai berikut :

- a. Belum adanya PNS Pejabat Fungsional Pelatihan Kerja;
- b. Tidak adanya instruktur dan sarana Pusat Pelatihan Kerja (PPK) yang dimiliki oleh Kota Makassar;



- c. Subkegiatan yang mendukung Pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi mengalami refofusing sehingga dari target awal sebanyak 560 orang menjadi 345 orang.

Adapun beberapa faktor pendorong dalam pelaksanaan pencapaian target/kinerja Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja tahun 2021 diuraikan sebagai berikut :

- a. Adanya LPK binaan Dinas Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan pelatihan;
- b. Adanya Program Skill Development Center yang di gagas oleh Badan Pembangunan Nasional Republik Indonesia;
- c. Kerjasama dengan BLK Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Adapun tindak lanjut yang dianggap perlu untuk dilaksanakan untuk mengoptimalkan realisasi capaian kinerja antara lain :

- a. Melakukan evaluasi pelatihan, dilakukan setelah pelatihan selesai dilaksanakan untuk evaluasi penyelenggaraan pelatihan dan pelaksanaan pelatihan;
- b. Melakukan pemantauan akreditasi lembaga pelatihan kerja (LPK) serta kurikulum pelatihan;
- c. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan program pelatihan untuk mempercepat sertifikasi pekerja melalui pengelolaan program pelatihan yang komprehensif;
- d. Mengembangkan program kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha dan antara pemerintah pusat-daerah untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui Pengembangan standar kompetensi dilaksanakan oleh pihak pengguna;
- e. Pengembangan program pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, dan Pengembangan sertifikasi kompetensi melalui uji kompetensi oleh LSP;

#### 4. Program Penempatan Tenaga Kerja

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat	100%	50%	50,23%	100,47%

Dimana tahun 2021 rata-rata capaian kinerja program sebesar 100,47 persen dengan rincian sebagai berikut :

- Dari target 50 persen Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan terealisasi sebesar 50,23 persen atau dengan capaian sebesar 100,47 persen. Dimana dari 4.907 orang pencari kerja yang ditempatkan sebanyak 2.465 orang.

Program Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari 4 (empat) kegiatan dan 9 (sembilan) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp. 2.195.572.481,- (dua milyar seratus sembilan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 964.127.023,- (sembilan ratus enam puluh empat juta seratus dua puluh tujuh ribu dua puluh tiga rupiah) atau sebesar 43,91 persen.

Adapun beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan pencapaian target/kinerja Program Penempatan Tenaga Kerja tahun 2021 diuraikan sebagai berikut :

- a. Subkegiatan Job Fair/Bursa Kerja tidak dapat dilaksanakan dikarenakan tidak terbitnya persetujuan Surat Permintaan Dana (SPD) beberapa rincian belanja penting dalam pelaksanaan kegiatan sehingga secara keseluruhan kegiatan Job Fair tidak dapat dilaksanakan. Sedangkan diketahui Job Fair merupakan salah satu kegiatan yang mendukung pencapaian penempatan tenaga kerja;
- b. Pada subkegiatan Perluasan Kesempatan Kerja dari 4 lokasi padat karya infrastruktur yang dapat dilaksanakan hanya 1 (satu lokasi) dikarenakan keterlambatan proses tender dan faktor cuaca;

- c. Resesi ekonomi akibat dampak pandemic Covid-19 menyebabkan banyak perusahaan menahan ekspansi, sehingga lowongan pekerjaan mengalami penurunan. Sedangkan jumlah pencari kerja mengalami penambahan dari pencari kerja baru ataupun tenaga kerja yang terkena dampak PHK;
- d. Masih terbatasnya PNS pejabat fungsional pengantar kerja (1 orang pejabat fungsional);
- e. Koordinasi lintas sektoral yang berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja formal dan informal belum optimal.
- f. Inovasi program perluasan lapangan kerja sektor informal masih minim sehingga angkatan kerja muda & berpendidikan kurang tertarik berusaha di sektor informal.

Adapun beberapa faktor pendorong dalam pelaksanaan pencapaian target/kinerja Program Penempatan Tenaga Kerja tahun 2021 diuraikan sebagai berikut :

- a. Melakukan jemput bola dengan lowongan pekerjaan di perusahaan;
- b. MoU dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Alaudin, Universitas Negeri Makassar (UNM) dan Universitas Muslim Indonesia (UMI) dalam pembentukan Bursa Kerja Khusus (BKK);
- c. Pengembangan jejaring informasi pasar kerja melalui aplikasi Info Kerja Makassar yang dapat di unduh pada google playstore.

Adapun tindak lanjut yang dianggap perlu untuk dilaksanakan untuk mengoptimalkan realisasi capaian kinerja antara lain :

- a. Akan membentuk regulasi tentang Wajib Laport Lowongan Kerja dan penggunaan tenaga kerja local;
- b. Akan lebih mendorong keberlangsungannya Forum SDC dan mengoptimalkan kegiatan pelayanan Penempatan Tenaga kerja;
- c. Penambahan Pejabat Fungsional Pengantar Kerja.

## 5. Program Hubungan Industrial

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	% Capaian
Angka sengketa perusahaan-pekerja pertahun	100%	2,5%	3,87%	45,34%
Persentase Kasus Hubungan Industrial Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)	90%	70%	78,30%	111,86%

Dimana tahun 2021 rata-rata capaian kinerja program sebesar 78,60 persen dengan rincian sebagai berikut :

- Dari target 2,50 persen Angka sengketa perselisihan hubungan industrial pertahun terealisasi sebesar 3,87 persen atau dengan capaian sebesar 45,34 persen. Dimana dari 5.483 perusahaan terdapat 212 kasus yang dilaporkan. Perlu diketahui indikator ini bermakna negatif, artinya jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya ;
- Dari target 70 Persen Kasus Hubungan Industrial Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB) terealisasi sebesar 78,30 persen atau dengan capaian sebesar 111,86 persen. Dimana dari 212 kasus yang dilaporkan sebanyak 166 kasus diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB). Sedangkan sebanyak 40 kasus diselesaikan dengan anjuran dan sebanyak 6 kasus masih dalam proses mediasi.

Program Hubungan Industrial terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 7 (tujuh) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp. 635.291.200,- (enam ratus tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 604.263.778,- (enam ratus empat juta dua ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) atau sebesar 95,12 persen.

Adapun beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan pencapaian target/kinerja Program Hubungan Industrial tahun 2021 diuraikan sebagai berikut :

- a. Gangguan terhadap aktivitas ekonomi karena kebijakan penguncian wilayah untuk menahan penyebaran virus telah menyebabkan banyak perusahaan menutup usaha dan mengalami kebangkrutan yang berdampak pada pengurangan jumlah pekerja maupun Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara besar-besaran terutama pada sektor-sektor yang paling terdampak pandemi. Hal ini menyebabkan angka sengketa hubungan industrial antara perusahaan dan pekerja masih tinggi;
- b. Selain itu, dalam penyelesaian kasus hubungan industrial terjadi peningkatan dengan anjuran (tidak terjadi kesepakatan antara perusahaan dan pekerja yang bersengketa) sehingga kasus Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) mengalami penurunan;
- c. Masih terbatasnya PNS pejabat fungsional mediator.

Adapun beberapa faktor pendorong dalam pelaksanaan pencapaian target/kinerja Program Hubungan Industrial tahun 2021 diuraikan sebagai berikut :

- a. Terbentuknya LKS Tripartit yang setiap bulan melakukan rapat kerja terkait isu-isu Ketenagakerjaan;
- b. Terbentuknya Dewan Pengupahan.

Adapun tindak lanjut yang dianggap perlu untuk dilaksanakan untuk mengoptimalkan realisasi capaian kinerja antara lain :

- a. Mengoptimalkan komunikasi antara semua pihak yang berkepentingan dan meningkatkan fungsi kaidah-kaidah hukum ketenagakerjaan sebagai rambu-rambunya;
- b. Penambahan Pejabat Fungsional Mediator.

Realisasi kemajuan belanja Dinas Ketenagakerjaan tahun 2021 sebesar Rp. 14.064.482.728,- (empat belas milyar enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) atau 86,44 persen dengan kategori serapan tinggi.

Secara keseluruhan pelaksanaan dari 27 (duapuluh tujuh) subkegiatan terdapat 1 (satu) subkegiatan tidak dapat dilaksanakan yaitu subkegiatan Job Fair/Bursa Kerja dan 1 (satu) subkegiatan dengan capaian kinerja dibawah 70 persen yaitu subkegiatan Perluasan Kesempatan Kerja dimana dari 4 lokasi padat karya infrastruktur yang dapat dilaksanakan hanya 1 (satu lokasi).

Sedangkan target dan realisasi anggaran per program yang telah dicapai di Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Rincian Realisasi Anggaran Per Program**  
**Tahun 2021**

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.130.348.820	8.680.154.223	94,50%
2	Perencanaan Tenaga Kerja	46.860.000	43.887.600	93,66%
3	Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	4.206.816.650	3.772.050.104	89,67%
4	Penempatan Tenaga Kerja	2.195.572.481	964.127.023	43,91%
5	Hubungan Industrial	635.291.200	604.263.778	95,12%
<b>TOTAL</b>		<b>16.269.889.151</b>	<b>14.064.482.728</b>	<b>86,44%</b>

Untuk lebih lengkapnya Evaluasi Hasil Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2021 sebagaimana disajikan pada Tabel 3.4 sesuai format Formulir Tabel E.81 di bawah ini :

**TABEL 3.4 (T-E.81)**  
**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH**  
**RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR**  
**PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2021**

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Kota Makassar yang Mengacu pada sasaran RKPd

- 0,58 Persen Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi
- 21,00 Persen Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja
- 50,00 Persen Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi
- 1.060 Orang Jumlah Peserta Pelatihan Skill Training Gratis Sektor Ketenagakerjaan
- 55,00 Persen Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Makassar
- 8.200 Peluang Kerja Dan Peluang Bisnis Baru
- 45,00 Persen Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			4		5		6		7		8		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 5 + 11		14 = 13/4 x 100%							
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						
2																												
2	2.07	01	URUSAN WAJIB																									
2	2.07	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			16.269.889.151		1.722.970.815			2.942.808.328		2.081.734.998		7.316.968.587	86,44%	14.064.482.728		86,44%		14.064.482.728							
2	2.07	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						100%	9.185.348.820	25,00%	1.614.784.355	25,00%	2.673.013.553	25,00%	1.835.438.638	25,00%	2.556.917.677	100,00%	8.680.154.223	100,00%	94,50%	100,00%	8.680.154.223	100,00%	94,50%	Disnaker	
			PERSENTASE KETERSEDIAAN LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH						90%		0,00%		0,00%	2.673.013.553	0,00%	1.835.438.638	25,00%	2.556.917.677	100,00%	8.680.154.223	100,00%	94,50%	100,00%	8.680.154.223	100,00%	94,50%	Disnaker	
			INDEKS KEPuasan ASN PERANGKAT DAERAH TERHADAP PELAYANAN KESEKRETARIATAN (KEPEGAWAIAAN, PERLENGKAPAN, DAN KEUANGAN)						90%		0,00%		0,00%		0,00%		88,50%		88,50%		98,33%		88,5%		98,3%			
			PERSENTASE ASN PERANGKAT DAERAH YANG MENDAPAT PENINGKATAN KAPASITAS						90%		0,00%		0,00%		0,00%		75,00%		65,00%		72,22%		65,0%		72,2%			
			PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA APARATUR DALAM KONDISI BAIK						90%		0,00%		20,00%		50,00%		20,00%		90,00%		100,00%		90,0%		100,0%			
2	2.07	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			11 Dok	128.638.000	3	14.000.000	1	27.025.000	2	33.119.000	5	41.523.600	11	115.667.600	100,00%	89,92%	11	115.667.600	100,00%	89,92%	Disnaker		
2	2.07	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah		2 Dok	69.599.000	1	14.000.000	1	27.025.000	0	18.521.000	0	1.342.200	2	60.888.200	100,00%	87,48%	2	60.888.200	100,00%	87,48%	Disnaker		
					Jumlah Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah		1 Dok			0	0	0	1		0	0		1		100,00%		1					Disnaker	
2	2.07	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dok	11.034.000	0	0	0	0	0	1	10.967.800	1	10.967.800	100,00%	99,40%	1	10.967.800	100,00%	99,40%	Disnaker			
2	2.07	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dok	10.329.000	0	0	0	1	7.475.000	0	2.787.800	1	10.262.800	100,00%	99,36%	1	10.262.800	100,00%	99,36%	Disnaker			
2	2.07	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dok	8.717.000	0	0	0	0	0	1	8.298.700	1	8.298.700	100,00%	95,20%	1	8.298.700	100,00%	95,20%	Disnaker			
2	2.07	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dok	8.552.000	0	0	0	0	0	1	8.448.700	1	8.448.700	100,00%	98,79%	1	8.448.700	100,00%	98,79%	Disnaker			
2	2.07	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah		1 Dok	11.384.000	1	0	0	0	7.123.000	0	936.200	1	8.059.200	100,00%	70,79%	1	8.059.200	100,00%	70,79%	Disnaker			
					Jumlah Penyusunan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah		1 Dok		1	0	0	0	0	0	1		1		100,00%		1				100,00%		Disnaker	
2	2.07	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah		1 Dok	9.023.000	0	0	0	0	0	1	8.742.200	1	8.742.200	100,00%	96,89%	1	8742200	100,00%	96,89%	Disnaker			
					Jumlah Penyusunan Dokumen LAKIP Perangkat Daerah		1 Dok		0	0	0	0	0	1		1		1		100,00%		1			100,00%		Disnaker	
2	2.07	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersusun		12 Bulan	7.650.632.949	3	1.489.562.736	3	2.362.989.354	3	1.536.538.128	3	1.996.677.988	12	7.385.768.206	100,00%	96,54%	12	7.385.768.206	100,00%	96,54%	Disnaker			
2	2.07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		12 Bulan	7.308.872.949	3	1.451.102.736	3	2.275.109.354	3	1.455.298.128	3	1.887.077.988	12	7.068.588.206	100,00%	96,71%	12	7.068.588.206	100,00%	96,71%	Disnaker		
2	2.07	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pengelolaan Administrasi Keuangan		12 Bulan	245.760.000	3	22.460.000	3	55.880.000	3	65.240.000	3	77.600.000	12	221.180.000	100,00%	90,00%	12	221.180.000	100,00%	90,00%	Disnaker		
2	2.07	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD		12 Bulan	96.000.000	3	16.000.000	3	32.000.000	3	16.000.000	3	32.000.000	12	96.000.000	100,00%	100,00%	12	96.000.000	100,00%	100,00%	Disnaker		
2	2.07	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersusun		12 Bulan	103.752.800	3	9.000.000	3	30.000.000	3	15.343.888	3	34.683.872	12	89.027.760	100,00%	85,81%	12	89.027.760	100,00%	85,81%	Disnaker			
2	2.07	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Jasa Pengamanan Gedung Kantor		12 Bulan	41.720.400	3	0	3	12.000.000	3	4.000.000	3	11.578.784	12	27.578.784	100,00%	66,10%	12	27.578.784	100,00%	66,10%	Disnaker		
2	2.07	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah		12 Bulan	62.032.400	3	9.000.000	3	18.000.000	3	11.343.888	3	23.105.088	12	61.448.976	100,00%	99,06%	12	61.448.976	100,00%	99,06%	Disnaker		
2	2.07	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		2 Jenis	126.621.400	1	9.000.000	0	18.000.000	1	75.329.888	0	22.772.088	2	125.101.976	100,00%	98,80%	2	125.101.976	100,00%	98,80%	Disnaker			
2	2.07	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya		108 Psg	64.800.000	0	0	0	108	63.986.000	0	0	108	63.986.000	100,00%	98,74%	108	63.986.000	100,00%	98,74%	Disnaker			
2	2.07	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pelayanan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		12 Bulan	61.821.400	3	9.000.000	3	18.000.000	3	11.343.888	3	22.772.088	12	61.115.976	100,00%	98,86%	12	61.115.976	100,00%	98,86%	Disnaker		
2	2.07	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diadakan		0 orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	Disnaker		
2	2.07	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jasa Administrasi Umum yang Tersedia		8 Jenis	318.509.382	1	3.200.000	2	19.149.200	2	52.594.400	3	192.092.826	8	267.036.426	100,00%	83,84%	8	267.036.426	100,00%	83,84%	Disnaker			
2	2.07	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan		8 Jenis	14.299.750	0	0	0	3	3.875.000	5	8.965.000	8	12.840.000	100,00%	89,79%	8	12.840.000	100,00%	89,79%	Disnaker			
2	2.07	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor		12 Bulan	84.654.632	3	0	3	0	3	28.927.000	3	40.237.500	12	69.164.500	100,00%	81,70%	12	69.164.500	100,00%	81,70%	Disnaker		
2	2.07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak		4 Jenis	17.190.000	0	0	0	0	0	4	16.450.000	4	16.450.000	100,00%	95,70%	4	16.450.000	100,00%	95,70%	Disnaker			
2	2.07	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan		12 Bulan	19.500.000	3	3.200.000	3	3.600.000	3	3.600.000	3	4.000.000	12	14.400.000	100,00%	73,85%	12	14.400.000	100,00%	73,85%	Disnaker		
2	2.07	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu		12 Bulan	72.865.000	3	0	3	0	3	5.074.000	3	52.391.026	12	57.465.026	100,00%	78,87%	12	57.465.026	100,00%	78,87%	Disnaker		
2	2.07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyediaan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah		12 Bulan	110.000.000	3	0	3	15.549.200	3	11.118.400	3	70.049.300	12	96.716.900	100,00%	87,92%	12	96.716.900	100,00%	87,92%	Disnaker		
2	2.07	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan BMD		4 Unit	68.042.269	0	0	1	43.000.000	1	2.200.000	2	11.348.000	4	56.548.000	100,00%	83,11%	4	56.548.000	100,00%	83,11%	Disnaker			
2	2.07	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Mesin Fotocopy		1 Unit	68.042.269	0	0	1	43.000.000	0	2.200.000	0	11.348.000	1	56.548.000	100,00%	83,11%	1	56.548.000	100,00%	83,11%	Disnaker		
					Jumlah Pengadaan AC		1 Unit		0	0	0	0	0	1		1		100,00%		1				100,00%		Disnaker		
					Jumlah Pengadaan Hardisk External		1 Unit		0	0	0	0	1		0	1		100,00%		1				100,00%		Disnaker		
					Jumlah Pengadaan Printer		1 Unit		0	0	0	0	0	1		1		100,00%		1				100,00%		Disnaker		
2	2.07	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang		3 Jenis	486.462.220	3	71.593.519	0	102.008.749	0	78.149.114	0	127.525.457	3	379.276.839	100,00%	77,97%	3	379.276.839	100,00%	77,97%	Disnaker			

2	2.07	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan					12 Bulan	147.740.600	3	21.000.000	3	42.000.000	3	27.882.072	3	55.211.672	12	146.093.744	100,00%	98,89%	12	146.093.744	100,00%	98,89%	Disnaker
2	2.07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik					12 Bulan	263.544.020	3	34.593.519	3	40.008.749	3	38.267.042	3	45.781.785	12	158.651.095	100,00%	60,20%	12	158.651.095	100,00%	60,20%	Disnaker
2	2.07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan Kantor					12 Bulan	75.177.600	3	16.000.000	3	20.000.000	3	12.000.000	3	26.532.000	12	74.532.000	100,00%	99,14%	12	74.532.000	100,00%	99,14%	Disnaker
2	2.07	01	2.09	01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah					4 Jenis	302.689.800	4	18.428.100	0	70.841.250	0	42.164.220	0	130.293.846	4	261.727.416	100,00%	86,47%	4	261.727.416	100,00%	86,47%	Disnaker
2	2.07	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Mobil Jabatan Secara Rutin/berkala					1 Unit	30.324.000	1	3.496.000	0	7.564.000	0	3.680.000	0	12.533.200	1	27.273.200	100,00%	89,94%	1	27.273.200	100,00%	89,94%	Disnaker
2	2.07	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Bus Pekerja Secara Rutin/Berkala					1 Unit	238.445.800	1	14.932.100	0	63.277.250	0	27.584.220	0	96.460.646	1	202.254.216	100,00%	84,82%	1	202.254.216	100,00%	84,82%	Disnaker
						Jumlah Pemeliharaan Mobil Operasional Secara Rutin/Berkala					6 Unit		6	0	0	0	0	0	0	6		100,00%		6		100,00%			Disnaker
						Jumlah Pemeliharaan Motor Operasional Secara Rutin/Berkala					7 Unit		7	0	0	0	0	0	0	7		100,00%		7		100,00%			Disnaker
2	2.07	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Komputer/Laptop Secara Rutin/Berkala					15 Unit	33.920.000	0	0	5	0	5	10.900.000	5	21.300.000	15	32.200.000	100,00%	94,93%	15	32.200.000	100,00%	94,93%	Disnaker
						Jumlah Pemeliharaan Printer Secara Rutin/Berkala					5 Unit		0	0	0	0	5		0	5		100,00%		5		100,00%			Disnaker
						Jumlah Pemeliharaan AC Secara Rutin/Berkala					8 Unit		0	0	0	0	5		3	8		100,00%		8		100,00%			Disnaker
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>																						<b>100,00%</b>	<b>94,50%</b>			<b>100,00%</b>	<b>94,50%</b>	<b>Disnaker</b>	
<b>Predikat Kinerja</b>																						<b>Sangat Tinggi</b>	<b>Sangat Tinggi</b>			<b>Sangat Tinggi</b>	<b>Sangat Tinggi</b>	<b>Disnaker</b>	
2	2.07	2			<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>	<b>PERSENTASE KEBUTUHAN PERENCANAAN TENAGA KERJA YANG DISUSUN</b>				50%	46.860.000	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	50,00%	43.887.600	50,00%	43.887.600	100,00%	93,66%	50,0%	43.887.600	100,00%	93,66%	Disnaker	
2	2.07	2	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang disusun				1 Dok	46.860.000	0	0	0	0	0	0	1	43.887.600	1	43.887.600	100,00%	93,66%	1	43.887.600	100,00%	93,66%	Disnaker	
2	2.07	2	2.01	02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro				50 Orang	46.860.000	0	0	0	0	0	0	50	43.887.600	50	43.887.600	100,00%	93,66%	50	43.887.600	100,00%	93,66%	Disnaker	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>																						<b>100,00%</b>	<b>93,66%</b>			<b>100,00%</b>	<b>93,66%</b>	<b>Disnaker</b>	
<b>Predikat Kinerja</b>																						<b>Sangat Tinggi</b>	<b>Sangat Tinggi</b>			<b>Sangat Tinggi</b>	<b>Sangat Tinggi</b>	<b>Disnaker</b>	
2	2.07	3			<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>PERSENTASE TENAGA KERJA YANG MENDAPATKAN PELATIHAN BERBASIS MASYARAKAT</b>				90%	4.206.816.650	0,00%	21.000.000	0,00%	42.000.000	58,06%	39.669.072	90,25%	3.669.381.032	90,25%	3.772.050.104	100,27%	89,67%	90,25%	3.772.050.104	100,27%	89,67%	Disnaker	
						<b>PERSENTASE TENAGA KERJA YANG MENDAPATKAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI</b>				80%		0,00%		0,00%		0,00%		57,40%		57,40%		71,76%		57,4%		71,76%			Disnaker
2	2.07	3	2.01		Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi yang dilaksanakan				620 Orang	3.433.153.050	0	0	0	0	0	0	0	3.060.215.840	620	3.060.215.840	100,00%	89,14%	620	3.060.215.840	100,00%	89,14%	Disnaker	
2	2.07	3	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan				620 Orang	3.178.930.050	0	0	0	0	360	0	260	2.813.233.040	620	2.813.233.040	100,00%	88,50%	620	2.813.233.040	100,00%	88,50%	Disnaker	
2	2.07	3	2.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja yang dilaksanakan				240 Orang	254.223.000	0	0	0	0	0	0	0	246.982.800	240	246.982.800	100,00%	97,15%	240	246.982.800	100,00%	97,15%	Disnaker	
2	2.07	3	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Mendapat Pembinaan				75 LPK	94.622.000	0	0	0	0	75	0	0	91.458.400	75	91.458.400	100,00%	96,66%	75	91.458.400	100,00%	96,66%	Disnaker	
2	2.07	3	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta				6 Kali	94.622.000	0	0	0	0	2	0	4	91.458.400	6	91.458.400	100,00%	96,66%	6	91.458.400	100,00%	96,66%	Disnaker	
						Jumlah peserta Pelatihan Penatausahaan Lembaga Pelatihan swasta (LPK)				75 Orang		0	0	0	0	75	0	0		75		100,00%		75		100,00%			Disnaker
2	2.07	3	2.03		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Penyediaan Jasa Perizinan dan Pendaftaran				12 Bulan	234.161.600	3	21.000.000	3	42.000.000	3	26.469.072	3	135.886.192	12	225.355.264	100,00%	96,24%	12	225.355.264	100,00%	96,24%	Disnaker	
2	2.07	3	2.03	01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Jumlah Peserta Bimtek Penyuluhan Standar Mutu dan Tata Kelola LPK				75 Orang	234.161.600	0	21.000.000	0	42.000.000	75	26.469.072	0	135.886.192	75	225.355.264	100,00%	96,24%	75	225.355.264	100,00%	96,24%	Disnaker	
						Jumlah Pelayanan Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi yang disediakan				12 Bulan		3		3		3			3	12		100,00%							Disnaker
2	2.07	3	2.04		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang mendapat Konsultasi Produktivitas				150 Prshn	150.846.000	0	0	0	0	0	0	150	114.152.000	150	114.152.000	100,00%	75,67%	150	114.152.000	100,00%	75,67%	Disnaker	
2	2.07	3	2.04	01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Pembinaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil yang dilaksanakan				150 Orang	150.846.000	0	0	0	0	0	0	150	114.152.000	150	114.152.000	100,00%	75,67%	150	114.152.000	100,00%	75,67%	Disnaker	
2	2.07	3	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Pengukuran Produktivitas Perusahaan				100 Prshn	294.034.000	0	0	0	0	0	0	13.200.000	45	267.668.600	45	280.868.600	45,00%	95,52%	45	280.868.600	45,00%	95,52%	Disnaker
2	2.07	3	2.05	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Pengukuran Produktivitas Perusahaan				25 Prshn	294.034.000	0	0	0	0	0	0	13.200.000	25	267.668.600	25	280.868.600	100,00%	95,52%	25	280.868.600	100,00%	95,52%	Disnaker
						Jumlah Peserta Pelatihan Bahasa Asing				20 Orang		0	0	0	0	0	0	20		20		100,00%		20		100,00%			Disnaker
						Jumlah Peserta Pelatihan Matematika				0 Orang		0	0	0	0	0	0	0		0		0,00%		0		0,00%			Disnaker
						Jumlah Seleksi Pemagangan				0 Keg		0	0	0	0	0	0	0		0		0,00%		0		0,00%			Disnaker
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>																						<b>89,00%</b>	<b>89,67%</b>			<b>89,00%</b>	<b>89,67%</b>	<b>Disnaker</b>	
<b>Predikat Kinerja</b>																						<b>Tinggi</b>	<b>Tinggi</b>			<b>Tinggi</b>	<b>Tinggi</b>	<b>Disnaker</b>	
2	2.07	4			<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>BESARAN PENCARI KERJA YANG TERDAFTAR YANG DITEMPATKAN</b>				50%	2.195.572.481	46,09%	60.186.460	54,37%	119.194.775	70,87%	94.641.224	50,23%	690.104.564	50,23%	964.127.023	100,47%	43,91%	50,23%	964.127.023	100,47%	50,23%	Disnaker	
2	2.07	4	2.01		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Antarkerja di Kota Makassar				12 Bulan	1.685.374.331	3	19.707.500	3	39.241.146	3	43.466.376	3	517.876.736	12	620.291.758	100,00%	36,80%	12	620.291.758	100,00%	36,80%	Disnaker	
2	2.07	4	2.01	01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah Dokumen Pemutakhiran Database Ketenagakerjaan				1 Dok	178.408.800	0	19.707.500	0	39.241.146	0	27.966.376	1	63.131.076	1	150.046.098	100,00%	84,10%	1	150.046.098	100,00%	84,10%	Disnaker	
						Jumlah Pelayanan Antar Kerja				12 Bulan		3		3		3			3	12		100,00%		12		100,00%			Disnaker
2	2.07	4	2.01	04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Peserta FGD Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan				100 Orang	47.503.000	0	0	0	0	0	0	100	47.319.500	100	47.319.500	100,00%	99,61%	100	47.319.500	100,00%	99,61%	Disnaker	
2	2.07	4	2.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah peserta pembinaan tenaga kerja mandiri				40 Orang	1.459.462.531	0	0	0	0	20	0	20	15.500.000	40	407.426.160	100,00%	28,98%	40	422.926.160	100,00%	28,98%	Disnaker	
						Jumlah Lokasi Padat Karya Infrastruktur				4 Lokasi								1		1		25,00%			25,00%				Disnaker
2	2.07	4	2.02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Penerbitan rekomendasi Penerbitan Izin LPTKS				12 Bulan	72.905.400	3	9.000.000	3	18.000.000	3	11.343.888	3	33.841.788	12	72.185.676	100,00%	99,01%	12	72.185.676	100,00%	99,01%	Disnaker	
2	2.07	4	2.02	01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi yang disediakan				12 Bulan	61.041.400	3	9.000.000	3	18.000.000	3	11.343.888	3	22.254.288	12	60.598.176	100,00%	99,27%	12	60.598.176	100,00%	99,27%	Disnaker	
2	2.07	4	2.02	02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah Pengawasan dan Pengendalian LPTKS				4 Keg	11.864.000	0	0	0	0	2	0	2	11.587.500	4	11.587.500	100,00%	97,67%	4	11.587.500	100,00%	97,67%	Disnaker	
2	2.07	4	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Informasi Pasar Kerja yang dikelola				12.000 Loker	373.368.500	1.864	31.478.960	5.124	61.953.629	2.639	39.830.960	0	98.746.040	9.627	232.009.589	80,23%	62,14%	9.627	232.009.589	80,23%	62,14%	Disnaker	
2	2.07	4	2.03	01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online				12 Bulan	23.232.000	3	1.478.960	3	1.953.629	3	2.018.000	3	1.987.500	12	7.438.089	100,00%	32,02%	12	7.438.089	100,00%	32,02%	Disnaker	
2	2.07	4	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online				12 Bulan	225.794.500	3	30.000.000	3	60.000.000	3	37.812.960	3	96.758.540	12	224.571.500	100,00%	99,46%	12	224.571.500	100,00%	99,46%	Disnaker	
2	2.07	4	2.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pelaksanaan Job Fair/Bursa Kerja				1 Kali	124.342.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	Disnaker	
2	2.07	4	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PMI Purna Penempatan yang Diberi pembekalan pelatihan																							



2	2.07	4	2.04	01	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (calon/purna yang diberikan pembinaan)					20 Orang	63.924.250	0	0	0	0	0	0	20	39.640.000	20	39.640.000	100,00%	62,01%	20	39.640.000	100,00%	62,01%	Disnaker	
						Jumlah Fasilitas Penjemputan PMI yang dipulangkan/deportasi					4 Kali	63.924.250	0	0	0	0	1	0	1		2	-	50,00%	0,00%	2	0	50,00%	0,00%	Disnaker	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>																							<b>70,06%</b>	<b>43,91%</b>				<b>70,06%</b>	<b>43,91%</b>	<b>Disnaker</b>
<b>Predikat Kinerja</b>																							<b>Sedang</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>78,60%</b>			<b>Sedang</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Disnaker</b>
2	2.07	5			<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>ANGKA SENGKETA PERUSAHAAN-PEKERJA PERTAHUN</b>					<b>2,50%</b>	<b>635.291.200</b>	<b>0,00%</b>	<b>27.000.000</b>	<b>0,00%</b>	<b>108.600.000</b>	<b>0,00%</b>	<b>111.986.064</b>	<b>3,87%</b>	<b>356.677.714</b>	<b>3,87%</b>	<b>604.263.778</b>	<b>45,34%</b>	<b>95,12%</b>	<b>3,87%</b>	<b>604.263.778</b>	<b>45,34%</b>		<b>Disnaker</b>	
						<b>PERSENTASE KASUS HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG DISELESAIKAN DENGAN PERJANJIAN BERSAMA (PB)</b>					<b>70,00%</b>		<b>59,52%</b>	<b>76,12%</b>		<b>76,12%</b>		<b>78,30%</b>		<b>78,30%</b>		<b>111,86%</b>		<b>78,30%</b>		<b>111,86%</b>		<b>Disnaker</b>		
2	2.07	5	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Pengesahan PP dan pelayanan Pendaftaran PKB					12 Bulan	253.240.000	3	0	3	12.000.000	3	21.200.000	3	200.182.350	12	233.382.350	100,00%	92,16%	12	233.382.350	100,00%	92,16%	Disnaker	
2	2.07	5	2.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Pembinaan dan Pemantauan Outsourcing dan Pemborongan					60 Prshn	48.739.000	0	0	0	0	0	0	60	44.443.750	60	44.443.750	100,00%	91,19%	60	44.443.750	100,00%	91,19%	Disnaker	
						Jumlah Pembinaan PKWT					50 Prshn		0	0	0	0	0	50		50		100,00%		50		100,00%		Disnaker		
2	2.07	5	2.01	02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Pembinaan dan Pemantauan PP/PKB (Pembinaan PP/PKB)					2 Kali	26.759.000	0	0	0	0	0	2	25.912.900	2	25.912.900	100,00%	96,84%	2	25.912.900	100,00%	96,84%	Disnaker		
2	2.07	5	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Pembinaan dan Pemantauan Jaminan Sosial Tenaga Kerja					4 Triwln	177.742.000	1	0	1	12.000.000	1	21.200.000	1	129.825.700	4	163.025.700	100,00%	91,72%	4	163.025.700	100,00%	91,72%	Disnaker	
						Jumlah Pembinaan dan Pemantauan Upah Minimum Kota					4 Triwln		1	1	1		1		1		4		100,00%		4		100,00%		Disnaker	
						Jumlah Penetapan Upah Minimum Kota (UMK)					1 UMK		0	0	0		0		1		1		100,00%		1		100,00%		Disnaker	
2	2.07	5	2.02		<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan</b>					12 Bulan	382.051.200	3	27.000.000	3	96.600.000	3	90.786.064	3	156.495.364	12	370.881.428	100,00%	97,08%	12	370.881.428	100,00%	97,08%	Disnaker	
2	2.07	5	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dialog Ketenagakerjaan (Mayday)					2 Keg	24.082.000	0	-	0	0	1	22.500.000	1	0	2	22.500.000	100,00%	93,43%	2	22.500.000	100,00%	93,43%	Disnaker	
						Jumlah Penetapan Upah Minimum Kota					2 Keg		0	0	0	0	0	2		2		100,00%		2		100,00%		Disnaker		
2	2.07	5	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan mediasi pengaduan perselisihan hubungan industrial					12 Bulan	187.383.200	3	27.000.000	3	54.000.000	3	34.031.664	3	69.777.864	12	184.809.528	100,00%	98,63%	12	184.809.528	100,00%	98,63%	Disnaker	
						Jumlah Peserta Temu Teknis Penegakan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial					50 orang		0	0	0	0	0	50		50		100,00%		50		100,00%		Disnaker		
2	2.07	5	2.02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Pembinaan dan Pemantauan Tujuan Hari Raya (THR)					1 Keg	11.018.000	0	0	1	9.600.000	0	0	0	1.300.000	1	10.900.000	100,00%	98,93%	1	10.900.000	100,00%	98,93%	Disnaker	
						Jumlah Pembinaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja					50 Prshn		0	0	0	0	0	50		50		100,00%		50		100,00%		Disnaker		
2	2.07	5	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pertemuan LKS yang dilaksanakan					12 Kali	159.568.000	3	0	3	33.000.000	3	34.254.400	3	85.417.500	12	152.671.900	100,00%		12		100,00%		Disnaker	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>																							<b>100,00%</b>	<b>95,12%</b>				<b>100,00%</b>	<b>95,12%</b>	<b>Disnaker</b>
<b>Predikat Kinerja</b>																							<b>Sangat Tinggi</b>	<b>Sangat Tinggi</b>				<b>Sangat Tinggi</b>	<b>Sangat Tinggi</b>	<b>Disnaker</b>
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)</b>																							<b>91,81%</b>	<b>86,44%</b>				<b>91,81%</b>	<b>86,44%</b>	<b>Disnaker</b>
<b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)</b>																							<b>Sangat Tinggi</b>	<b>Tinggi</b>				<b>Sangat Tinggi</b>	<b>Tinggi</b>	<b>Disnaker</b>

Disusun  
Makassar, April 2021  
KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN  
KOTA MAKASSAR

NIELMA PALAMBA, SH, M. AP.  
Nip. 19651210 199112 2 001

Dievaluasi  
Makassar, Desember 2021  
KEPALA BAPPEDA  
KOTA MAKASSAR

HELMY BUDIMAN, S.STP, MM  
Nip. 19840513 200212 1 002

### **3.3. Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Strategis Perangkat Daerah**

Seperti telah diketahui pada tahun 2021 Pemerintah Kota Makassar belum menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sehingga Dinas Ketenagakerjaan belum menyusun Rencana Strategis (RENSTRA).

# BAB 4

## KENDALA YANG DIHADAPI

Realisasi anggaran dan kinerja program Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar telah berjalan sesuai program/kegiatan yang tercantum dalam Renja Tahun 2021. Namun dalam pelaksanaan program/kegiatan perlu dilakukan review terhadap program/kegiatan untuk perbaikan pada tahun berikutnya, baik dari faktor yang mendorong tercapainya kinerja program, faktor yang menghambat terlaksananya program/kegiatan maupun tindak lanjut yang akan dilakukan untuk kedepannya hingga semua program/kegiatan dapat terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan.

Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pencapaian target/kinerja program yang dilaksanakan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar tahun 2021 diuraikan sebagai berikut :

1. Adanya pembatasan aktifitas sosial ekonomi di masa pandemi virus COVID-19 mengakibatkan beberapa kegiatan strategis tidak dapat dilaksanakan. Beberapa kegiatan yang terdampak Covid-19 tersebut antara lain pada kegiatan Job Fair dan Padat Karya Infrastruktur;
2. Dengan adanya kebijakan physical distancing beberapa kerjasama sama dengan stakeholder tidak dapat dilaksanakan antara lain Bursa Kerja Khusus (BKK) dengan beberapa Universitas di Kota Makassar dan pelatihan serta pemagangan yang dilaksanakan oleh APINDO;
3. Belum adanya PNS Pejabat Fungsional Pelatihan Kerja dan Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat;
4. Masih terbatasnya PNS Penjabat Fungsional Pengantar Kerja dan Pejabat Fungsional Mediator Hubungan Industrial;
5. Koordinasi lintas sektoral yang berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja formal dan informal belum optimal;

6. Inovasi program perluasan lapangan kerja sektor informal masih minim sehingga angkatan kerja muda & berpendidikan kurang tertarik berusaha di sektor informal.
7. Masih kurangnya kesadaran dari pemberi kerja/perusahaan untuk melaporkan tenaga kerja baru. Demikian pula halnya Pencari kerja masih kurangnya kesadaran dalam melaporkan apabila telah diterima bekerja.
8. Meningkatnya kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan perselisihan hubungan industrial akibat dampak Pandemi Covid-19;

Adapun tindak lanjut yang dianggap perlu untuk dilaksanakan Dinas Ketenagakerjaan untuk mengoptimalkan realisasi capaian kinerja ditahun berikutnya antara lain :

1. Akan membentuk regulasi tentang Wajib Lapori Lowongan Kerja sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1980 yang menyatakan “Setiap pengusaha atau pengurus wajib segera melaporkan secara tertulis setiap ada atau akan ada lowongan pekerjaan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuknya”;
2. Akan lebih mendorong keberlangsungannya Forum SDC dan akan lebih mengoptimalkan kegiatan-kegiatan pelayanan Penempatan Tenaga kerja;
3. Mendorong swasta mengadakan atau membuat lembaga-lembaga pelatihan, menyiapkan standarisasi dan penerbitan sertifikat;
4. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan program pelatihan untuk mempercepat sertifikasi pekerja melalui pengelolaan program pelatihan yang komprehensif;
5. Mengembangkan program kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha dan antara pemerintah pusat-daerah untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui Pengembangan standar kompetensi dilaksanakan oleh pihak pengguna;
6. Pengembangan program pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, dan Pengembangan sertifikasi kompetensi melalui uji kompetensi oleh LSP;
7. Mengoptimalkan komunikasi antara semua pihak yang berkepentingan dan meningkatkan fungsi kaidah-kaidah hukum ketenagakerjaan sebagai rambu-rambunya;

8. Serta penambahan Pejabat Fungsional Pengantar Kerja dan Pejabat Fungsional Mediator.

### 5.1. Kesimpulan

Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Triwulan II tahun 2021 Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar mengacu pada program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja (RENJA) tahun 2021 Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar yang berpedoman pada RKPD Kota Makassar.

Realisasi kemajuan belanja Dinas Ketenagakerjaan tahun 2021 sebesar Rp. 14.064.482.728,- (empat belas milyar enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) atau 86,44 persen dengan kategori serapan tinggi.

Realisasi capaian target kinerja 5 program tahun 2021 yaitu 2 (dua) program capaian berkinerja sangat tinggi ( $91\% \leq 100\%$ ); 2 (dua) program capaian berkinerja tinggi ( $76\% \leq 90\%$ ) dan 1 (satu) program capaian berkinerja sedang ( $66\% \leq 75\%$ ).

Secara keseluruhan pelaksanaan dari 27 (duapuluh tujuh) subkegiatan terdapat 1 (satu) subkegiatan tidak dapat dilaksanakan yaitu subkegiatan Job Fair/Bursa Kerja dan 1 (satu) subkegiatan dengan capaian kinerja dibawah 70 persen yaitu subkegiatan Perluasan Kesempatan Kerja dimana dari 4 lokasi padat karya infrastruktur yang dapat dilaksanakan hanya 1 (satu lokasi).

Secara umum capaian kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar tahun 2021 dapat disimpulkan berdasarkan analisis pencapaian Indikator Kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar telah dapat memenuhi sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan Kinerja. Hal ini dapat dilihat dari capaian Indikator Kinerja Program rata-rata Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar tahun 2021.

## 5.2. Rekomendasi

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar dan mengatasi kendala-kendala yang dihadapi ditahun 2021 perlu dilakukan upaya sebagai berikut:

1. Menyusun dan menetapkan indikator kinerja melalui koordinasi internal Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, untuk membahas dan menyepakati indikator kinerja atas program-kegiatan yang dilaksanakan pada bagian-bagian sehingga dapat memperjelas target tujuan yang hendak dicapai dengan ukuran yang tersusun secara sinergis, sistematis dan secara signifikan terarah pada peningkatan capaian kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar.
2. Meningkatkan kualitas SDM Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar melalui pelaksanaan pelatihan-pelatihan, pembinaan yang berkelanjutan, serta pemberian kesempatan pendidikan, guna peningkatan kualitas pengetahuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugasnya.
3. Peningkatan mutu pelayanan melalui pemberian kesempatan yang lebih luas dalam mengikuti Diklat.